

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

10 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	Harga Panenan Turun	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Antara/Ahmad Subaidi	

» Harga Panenan Turun



ANTARA/AHMAD SUBAIDI

» Dua orang buruh tani memanen bawang merah di Senaru, Kecamatan Bayan, Tanjung Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (8/6). Harga bawang merah di tingkat petani di daerah tersebut turun dari harga 1,6 juta rupiah per kuintal menjadi 1,4 juta rupiah per kuintal akibat melimpahnya hasil panen.

Title	FAO: "Aquafarming" Menjadi Sumber Utama Ikan Global	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	SB/N-3	

Pengembangan Perikanan

FAO: "Aquafarming" Menjadi Sumber Utama Ikan Global

ROMA – Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organisation (FAO), pada Jumat (7/6), menyebutkan untuk pertama kali, produksi perairan yang dibudidayakan telah melampaui hasil tangkapan dari perikanan tangkap tradisional, menggarisbawahi harapan budi daya perairan dapat memenuhi permintaan makanan laut global yang terus meningkat.

Dalam laporan dua tahunan terbaru mengenai keadaan perikanan dunia, Badan Pangan dan Pertanian PBB yang berbasis di Roma ini mengatakan produksi perikanan dan akuakultur global pada 2022 mencapai rekor 223,2 juta ton.

Dikutip dari *The Straits Times*, akuakultur yang juga dikenal sebagai *aquafarming* adalah budi daya organisme akuatik, seperti ikan, krustasea, moluska, dan tanaman air serta alga di lingkungan yang terkendali.

FAO mengatakan produksi akuakultur mencapai angka 130,9 juta ton yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2022, di mana 94,4 juta ton di antaranya berasal dari hewan akuatik, 51 persen dari total produksi hewan akuatik.

"Angka-angka ini menunjukkan potensi budi daya perikanan untuk memberi makan populasi dunia yang terus



ISTIMEWA

Produksi perikanan budi daya pada 2022 mencapai rekor 223,2 juta ton, memberikan harapan produksi itu dapat memenuhi permintaan makanan laut global yang terus meningkat.

bertambah. Ini merupakan sistem produksi pangan dengan pertumbuhan tercepat (di dunia) selama lima dekade terakhir," kata Asisten Direktur Jenderal FAO, Manuel Barange, kepada wartawan.

Penting Dikembangkan

Namun, hanya 10 negara, yaitu Tiongkok, Indonesia, India, Vietnam, Bangladesh, Filipina, Korea Selatan, Norwegia, Mesir, dan Cile, yang menyumbang hampir 90 persen dari seluruh produksi akuakultur. FAO mengatakan penting untuk mengembangkan industri ini di negara lain, khususnya di Afrika, yang saat ini merupakan negara

pengimpor ikan.

Kritikus mengatakan budi daya perairan dapat merusak lingkungan dan membawa penyakit serta spesies invasif ke alam liar, namun FAO mengatakan hal ini dapat dihindari dengan adanya peraturan dan pemantauan yang tepat.

Laporan tanggal 7 Juni tersebut menyatakan konsumsi tahunan per kapita global atas makanan hewani akuatik, sumber utama protein bagi jutaan orang di seluruh dunia, berjumlah 20,7 kilogram pada tahun 2022, naik dari 9,1 kilogram pada tahun 1961, dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. ■ **SB/N-3**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Tittle	Filipina Melarang Impor Unggas dari Australia karena Flu Burung	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	SB/N-3	

Kebijakan Pemerintah

Filipina Melarang Impor Unggas dari Australia karena Flu Burung

MANILA - Filipina, pada Sabtu (8/6), mengeluarkan larangan impor unggas dan produk unggas dari Australia menyusul kasus flu burung yang terjadi di negara tersebut.

Departemen Pertanian Manila mengatakan dalam sebuah pernyataan, menyebutkan adanya wabah H7N3 dan H7N9, sub tipe virus flu burung yang sangat patogen pada tanggal 23 Mei dan 25 Mei di negara bagian Victoria, sebagaimana dikonfirmasi oleh Pusat Kesiapsiagaan Penyakit Australia.

Dikutip dari *The Straits Times*, dalam sebuah memorandum yang ditandatangani Menteri Pertanian Francisco Tiu Laurel pada 6 Juni, semua pengiriman unggas domestik dan liar dari Australia akan diizinkan asalkan mereka disembelih atau diproduksi pada atau sebelum tanggal 9 Mei.

"Australia adalah negara sumber daging ayam impor terbesar keempat di negara Asia Tenggara, dengan jumlah total 5.365 ton pada bulan April. Pada periode yang sama, Filipina mengimpor 46.987 ekor anak

ayam umur sehari dan 30.780 butir telur tetas," kata departemen itu.

Perjalanan ke India

Secara terpisah, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) mengatakan seorang anak yang dikonfirmasi sebagai orang pertama yang tertular flu burung H5N1 pada manusia di Australia kemungkinan besar terpapar virus tersebut selama perjalanan ke India.

Anak perempuan berusia 2,5 tahun itu dirawat di rumah sakit pada bulan Maret sekembalinya dan menghabiskan waktu di perawatan intensif di Melbourne sebelum pulih. Keluarga anak tersebut mengatakan mereka tidak pernah terpapar dengan orang atau hewan yang terinfeksi selama berada di sana.

WHO mengatakan 891 kasus infeksi H5N1 pada manusia dilaporkan dari tahun 2003 hingga 22 Mei 2024, termasuk 463 kematian. Kasus-kasus tersebut tersebar di dua lusin.

"Anak tersebut dirawat di rumah sakit pada 2 Maret dan dirawat di



Peternak menggiring bebeknya di pinggiran Kota Manila, beberapa waktu lalu. Pengiriman unggas domestik dan liar dari Australia yang disembelih atau diproduksi setelah tanggal 9 Mei telah dilarang.

sana selama lebih dari dua minggu. Tidak ada kontak keluarga dekat di Australia atau India yang mengalami gejala hingga 22 Mei," kata WHO. WHO mengatakan penguru-

tan genetik menunjukkan virus itu adalah sub tipe H5N1 dan bagian dari *strain* yang beredar di Asia Tenggara dan telah terdeteksi pada infeksi sebelumnya pada manusia

dan unggas.

Pakar penyakit menular di Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins, Amesh Adalja, mengatakan meskipun hal ini akan sulit dilakukan berbulan-bulan setelah kejadian tersebut, penyelidikan diperlukan untuk melihat apakah anak tersebut melakukan kontak dengan unggas atau burung lain atau jika ada wabah versi H5N1 ini di dekatnya.

"Virus H5N1 tidak menular secara efisien antarmanusia dan saya curiga ada paparan hewan yang menyebabkan infeksi tersebut," kata Adalja.

Sementara itu, badan-badan federal dan negara bagian Amerika Serikat, sedang merencanakan penelitian mengenai potensi penyebaran flu burung pada sapi perah.

"Para ilmuwan dan pejabat pemerintah berharap penelitian ini akan memandu upaya membendung virus dan mengurangi paparan terhadap manusia. Penyebaran melalui saluran pernapasan dapat memberi virus lebih banyak peluang untuk berevolusi," kata pejabat pertanian dan kesehatan ma-

nyarakat negara bagian Michigan.

Para ilmuwan sejauh ini menduga virus ini menyebar di antara hewan dan manusia melalui kontak dengan susu yang terinfeksi atau tetesan susu yang mengandung aerosol, atau dari paparan terhadap burung atau unggas yang terinfeksi.

Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Michigan bekerja sama dengan Michigan State University dan Departemen Pertanian AS atau US Department of Agriculture (USDA), merencanakan penelitian di pertanian guna mengevaluasi penyebaran penyakit melalui pemapasan.

"Ini merupakan kekhawatiran yang sedang kami kembangkan dan cari tahu lebih lanjut. Penelitian ini merupakan prioritas tinggi dan penting untuk memandu kebijakan publik negara," kata Boring.

Juru Bicara USDA mengatakan lembaga tersebut sedang meneliti infeksi pernapasan pada sapi perah dengan mitra termasuk universitas di seluruh negeri untuk lebih memahami virus ini dan mengendalikan penyebarannya. ■ SB/N-3

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Kasad: Pastikan Petani Hidup Layak lewat Program Ketahanan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	YK/N-3	

Strategi Pembangunan

Kasad: Pastikan Petani Hidup Layak lewat Program Ketahanan Pangan

BANJARBARU – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta kepada jajaran untuk memastikan petani mendapatkan kehidupan yang layak di berbagai daerah melalui program ketahanan pangan terpadu TNI.

“Saya mengharapkan para pimpinan TNI AD di berbagai daerah untuk mengupayakan petani sebagai mitra program ketahanan pangan mendapatkan perekonomian yang layak,” kata Jenderal Maruli, setelah meresmikan lahan ketahanan pangan terpadu Kodim 1006/Banjar, di Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (8/6).

Seperti dikutip dari *Antara*, Kasad menekankan agar jajaran TNI AD tidak sesekali mengutamakan pembagian hasil pertanian dari program ketahanan pangan.

“Jadi, jangan langsung hitung teori soal petani berapa persen dan TNI berapa persen. Jangan dulu, fokus saja bagaimana caranya agar program ini memberikan hasil maksimal dan kehidupan pe-



ANTARA

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat

tani dapat lebih layak,” ujarnya.

Namun, Jenderal Maruli meminta melalui program ketahanan pangan, petani dapat memperoleh pendapatan yang setara dengan upah minimum regional (UMR) di berbagai daerah, atau jika tidak dapat melebihi, minimal mendekati angka UMR agar petani lebih sejahtera.

Menurut dia, jajaran TNI AD di berbagai daerah harus

dapat mengetahui apa yang dibutuhkan petani dalam program ketahanan pangan terpadu, utamanya dapat memahami berapa nominal standar kehidupan yang layak bagi petani di daerah masing-masing.

Lakukan Inovasi

Selain itu, dia mengharapkan jajaran untuk berinovasi agar produktivitas pertanian di lahan ketahanan pangan mengalami peningkatan yang signifikan.

“Kalau panen nanti harus ada data berapa jumlah produksi yang meningkat, harus ada pembandingan panen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, saya ingatkan jangan main-main dengan program ini, kalau daerah hanya sekadar basa-basi membuka lahan, saya tidak akan kunjungi,” ujar Jenderal Maruli.

Dia menilai lahan ketahanan pangan terpadu yang baru saja diresmikannya di Banjarbaru, memiliki prospek dan peluang bagus dengan luas lahan mencapai 2.487 hektare. ■ YK/N-3

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Negara Harus Jamin Akses Pangan Berkualitas	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ers/E-10	

Peningkatan Kualitas SDM | Sekitar 25% dari Populasi Balita di Dunia Alami Kemiskinan Pangan Parah

Negara Harus Jamin Akses Pangan Berkualitas

Pemerintah perlu memberikan jaminan hidup, khususnya pangan bergizi bagi anak-anak dari keluarga miskin atau prasejahtera dan rawan “stunting”.

JAKARTA – Kemudahan akses pangan berkualitas dan pemberian pangan bergizi menjadi kunci utama bagi pemerintah mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan. Sebab, laporan Unicef terbaru menyebutkan satu dari empat anak di bawah usia lima tahun (balita) mengalami kemiskinan pangan parah.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, menegaskan untuk Indonesia, perlu ada jaminan hidup, khususnya pangan bergizi bagi anak-anak dari keluarga miskin atau prasejahtera dan rawan *stunting*.

“Ini sangat penting agar ma-

salah kemiskinan dan *stunting* di Indonesia khususnya tidak semakin parah,” tegasnya kepada *Koran Jakarta*, Minggu (9/6).

Awan mengaku miris dengan laporan terbaru lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu seraya berharap agar di Indonesia masalah ini tidak terlalu parah.

“Selain bekerja sama dengan program pokok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), bisa juga dengan koperasi, atau UMKM *catering*/warung makan setempat untuk menyiapkan dan membagikan paket makan bergizi,” ucapnya.

Peneliti Sustainability

Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, menyoroti secara khusus intervensi pemerintah dalam mengatasi masalah akses pangan dan kesehatan. Makanya menurut dia, akses pangan dan kesehatan ini perlu dikembangkan sampai tingkat terbawah di layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas).

“Peluang intervensi yang lebih efektif dapat juga dilakukan dengan revitalisasi dan dukungan penuh untuk gerakan PKK dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk menjadikan keduanya menjadi pilar penyelesaian masalah kemiskinan dan perbaikan kualitas generasi mendatang,” jelasnya.

Faktor Kemiskinan

Hafid melanjutkan faktor kemiskinan memang menjadi masalah dominan sehingga anak tidak mendapatkan du-

kungan memadai dari keluarganya untuk mengakses makanan bergizi dan layanan kesehatan secara optimal. Namun, faktor yang juga tidak kalah penting adalah soal budaya dan akses literasi dan pengetahuan orang tua untuk memberikan dukungan optimal terhadap tumbuh kembang anak.

“Bagi keluarga miskin, keduanya menjadi rantai setan yang harus diputus, anak-anak keluarga miskin cenderung tidak mendapatkan dukungan optimal dan pada akhirnya menularkan kemiskinan pada generasi berikutnya,” ucap Hafids.

Menurutnya, akar permasalahan utama yang sangat berisiko lebih pada pernikahan dini dan ketidaksiapan keluarga yang terlalu muda untuk mengelola pertumbuhan anak-anaknya. Akibatnya, banyak terjadi kasus *stunting* yang linear

dengan rasio pernikahan dini.

Selain itu juga, lanjutnya, perlunya dukungan khusus dan konseling yang mudah diakses untuk orang tua dari keluarga miskin.

Seperti diketahui, laporan Unicef menyebutkan sekitar 27 persen anak di bawah usia lima tahun atau 181 juta diberi makan tidak lebih dari dua dari delapan kelompok makanan per hari. Kondisi itu digolongkan Unicef sebagai kemiskinan pangan yang parah.

Jika anak-anak tidak mengonsumsi nutrisi penting, mereka cenderung mengalami *wasting*, bentuk malnutrisi paling parah. “Jika *wasting* semakin parah, mereka 12 kali lebih mungkin berisiko meninggal dunia,” kata Harriet Torlesse, salah seorang penulis laporan tersebut, kepada kantor berita *The Associated Press*, beberapa waktu lalu. ■ **ers/E-10**

Tittle	Pencegahan Penularan PMK Hewan Kurban	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	2	
Author	Antara/Asep Fathulrahman	

» Pencegahan Penularan PMK Hewan Kurban



ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN

» Pekerja membersihkan kaki hewan kurban di sentra penjualan hewan di Cipocok, Serang, Banten, Sabtu (8/6). Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) diantara hewan kurban peternak melakukan sejumlah upaya seperti melakukan imunisasi, menjaga kebersihan kandang dan hewan, memberi pakan berkualitas serta meningkatkan imunitas hewan dengan makanan tambahan.

Title	Stok Beras Diklaim Aman Hadapi Idul Adha	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Ant/E-10	

Ketersediaan Pangan

Stok Beras Diklaim Aman Hadapi Idul Adha

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjamin stok beras cadangan pemerintah dalam kondisi aman, menghadapi Hari Raya Idul Adha 2024. Saat ini, stok di gudang Perum Bulog mencapai 1,81 juta ton.

"Sekarang kan semuanya sudah dipersiapkan (menghadapi Idul Adha). Jadi, kita punya (beras) cadangan pangan, cadangan pemerintah," kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi di sela menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri

di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Arief menyampaikan stok cadangan beras pemerintah saat ini yang dikuasi Perum Bulog mencapai 1,8 juta ton. Stok tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat utamanya menghadapi Idul Adha.

Dia juga mengatakan dirinya telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah bersama Presiden Joko Widodo untuk memantau sejumlah harga pangan, bahkan meninjau sejumlah

beras Perum Bulog.

"Kemarin saya baru dari Agam di Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat juga sudah punya cadangan pangan," ucap Arief.

Selain Sumatera Barat, Arief mengatakan juga telah mengunjungi berbagai daerah lainnya seperti Kota Lubuklinggau di Sumatera Selatan; Kota Dumai, Pakanbaru di Riau; Merangin di Jambi; Kota Kendari, Kabupaten Muna, Muna

Barat, dan Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Sudah banyak yang kami kunjungi, udah keliling. Bahkan sebelumnya ke Biak, ke Nagekeo di NTT, Kupang, banyak," ujar Arief.

Meski begitu Arief tidak merinci sejumlah harga pangan. Namun, dia memastikan pangan di daerah yang telah dikunjungi bersama Presiden Joko Widodo dalam kondisi relatif aman dan terjangkau.

"Harga-harga relatif stabil. Dengan Pak Presiden kemarin kan baru dari Riau. Ya tugas kita memang harus memastikan harga stabil dan stok aman,

karena wilayah kita itu luas," tutur Arief.

Langkah Proaktif

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan stok beras dalam menghadapi Idul Adha 2024 dalam kondisi yang aman, karena saat ini stok di gudang BUMN bidang pangan itu mencapai 1,81 juta ton.

"(Jelang Idul Adha) saat ini stok (beras) Bulog sangat aman, karena kami memiliki stok 1,81 juta ton. Menurut saya stok itu sangat aman (menghadapi Idul Adha, Red)," kata Bayu di Jakarta, Senin (27/5). ■ **Ant/E-10**



Title	Warga Jakarta Didorong Olah Pangan Segar	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	8	
Author	Ant/G-1	

Ekonomi Wilayah

Warga Jakarta Didorong Olah Pangan Segar

JAKARTA - Guna mengantisipasi inflasi karena kenaikan harga-harga, warga Jakarta diminta mengolah bahan pangan segar menjadi pangan olahan. Usul ini disampaikan Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jakarta, Sahminan, Sabtu.

"Pangan segar yang diolah jadi pangan olahan bisa tahan lebih lama sehingga saat pasokan berkurang di sentra produksinya, kita bisa mengonsumsi yang sudah diolah tadi," katanya. Dia mengatakan ini dalam Talkshow bertajuk "Kreasi Pangan Olahan: Konsumsi Sehat, Lezat dan Inflasi Terjaga."

Kegiatan ini digelar dalam rangkaian Jakreatifest 2024.

Sahminan menjelaskan, kenaikan harga bahan pangan segar seperti cabai merah, cabai rawit dan bawang merah menjadi salah satu pemicu inflasi Jakarta.

Meski porsi konsumsi cabai merah hanya 0,33 persen, cabai rawit 0,2 persen dan bawang merah 0,31 persen, kenaikan harga komoditas tersebut bisa mencapai 50-100 persen. Sebab ini sangat bergantung pada faktor cuaca yang mempengaruhi produksinya.

Komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang memang sangat bergantung pada kondisi iklim dan cuaca. Di bulan Maret hingga Mei, misalnya, produksi cabai melimpah sehingga harga di pasaran

turun. Sebaliknya, saat cuaca memburuk, produksi anjlok sehingga pasokan berkurang dan harga melonjak.

"Jadi meski porsinya dalam pengeluaran kecil, cuma 0,33 persen, kalau kenaikannya bisa 300 persen, tentu lumayan juga," tuturnya.

Karena itu, pengolahan bahan pangan segar menjadi salah satu strategi untuk merespons inflasi yang terjadi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mempertimbangkan aspek kesehatan dan rasa enak dalam pengolahan bahan pangan.

Adapun dari sisi ekonomi, pengolahan bahan pangan segar diharapkan bisa mendorong stabilitas harga pangan yang dikonsumsi masyarakat

terutama saat produksi turun.

Sahminan mengatakan dorongan untuk melakukan pengolahan pangan perlu dilakukan oleh masyarakat Jakarta. Sebab pasokan pangan segar ibu kota masih ditopang dari luar daerah. Tercatat 98 persen kebutuhan makanan Jakarta berasal dari sentra produksi luar daerah.

Kebutuhan pangan pun bertambah karena pada siang hari, Jakarta mendapatkan tambahan warga dari wilayah sekitar yang bekerja atau sekolah dan kuliah di Jakarta.

"Jakarta itu unik karena ada 'penduduk siang', penduduk Jakarta yang 10,33 juta jiwa, di siang hari ada tambahan 3,3 juta dari sekitar Jakarta yang

kerja atau kuliah di Jakarta," kata Sahminan.

Di kesempatan yang sama, Celebrity Chef Firhan Ashar menjelaskan bahan pangan segar bisa diolah untuk memperpanjang masa simpannya. Sejumlah cara yang bisa digunakan adalah dengan direndam di dalam minyak, dibekukan hingga dikeringkan.

"Saya pernah membeli bawang bombay yang sudah diiris dan direndam dalam minyak. Rasanya tidak berubah sama sekali. Bahkan bisa awet sebulan di dalam kulkas dan tiga bulan di freezer. Itu akan cuan banget buat pemilik restoran, beli saat murah dan disimpan," katanya. ■ **Ant/G-1**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	HARGA ECERAN BARU BERAS DIRESPON BERAGAM	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	19	
Author	Dwi Rachmawati & Ni Luh Anggela	

| BAHAN PANGAN |

HARGA ECERAN BARU BERAS DIRESPONS BERAGAM

Kebijakan Badan Pangan Nasional menaikkan harga eceran tertinggi beras dan harga pembelian pemerintah atas gabah petani per 5 Juni 2024 ditanggapi berbeda antara pedagang dan petani padi di Tanah Air.

Dwi Rachmawati & Ni Luh Anggela
redaksi@bisnis.com

Keputusan penting menyangkut stabilitas pasokan dan harga beras akhirnya dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu (5/6). Kebijakan yang menyangkut produk makanan pokok paling penting di Indonesia tercantum dalam Peraturan Bapanas (Perbadan) No. 5/2024 tentang Perubahan atas Perbadan No. 7/2023 tentang HET Beras.

Setidaknya, Perbadan No. 5/2024 itu menguatkan kebijakan relaksasi harga beras medium dan beras premium yang telah berlaku selama kurang lebih 2 bulan.

Dalam beleid itu, Bapanas menetapkan HET beras sesuai dengan wilayah. Untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel), Bapanas menetapkan HET beras medium Rp12.500 per kilogram (kg) dan HET beras premium Rp14.900 per kg.

Untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras medium Rp13.100 per kg dan HET beras premium Rp15.400 per kg.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan penyesuaian HET beras sudah melalui proses panjang, dengan melibatkan organisasi petani, penggilangan, serta kementerian/lembaga terkait.

"Ini kita analisis bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bagaimana

na dampaknya terhadap inflasi," ujarnya, akhir pekan lalu.

Selain beras, Arief juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.000 per kg.

Kebijakan itu tercantum dalam Perbadan No. 4/2024 tentang Perubahan Atas Perbadan 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Besaran HPP gabah dan beras yang tercantum dalam beleid itu sama dengan kebijakan fleksibilitas HPP yang ditetapkan sejak 3 April 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 167/2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan GKP di tingkat petani sebesar Rp6.000 per kg, dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.

Khusus GKP di tingkat penggilangan, pemerintah mematok HPP sebesar Rp6.100 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.

Selain itu, Bapanas menetapkan gabah kering giling (GKG) di penggilangan sebesar Rp7.300 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%.

Dalam beleid itu, Bapanas juga mengatur mengenai rafaksi harga gabah dan beras.

"Dalam hal pembelian gabah

atau beras diluar ketentuan kualitas gabah dan beras yang ditetapkan HPP, diberikan rafaksi harga gabah dan beras," bunyi Pasal 3 (1) beleid itu.

Dia menegaskan penetapan HPP tersebut bisa menjaga dan melindungi harga dasar gabah dan beras di tingkat petani.

"Instrumen ini kita harapkan dapat melindungi kepentingan petani di hulu, sehingga harga gabah/beras tidak jatuh di tingkat produsen dan dapat menjadi dasar bagi Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani," kata Arief.

Kebijakan pemerintah direspons puas para pelaku usaha beras. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilangan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso mengatakan Perbadan No. 4/2024 menjadi momentum yang ditunggu-tunggu pelaku usaha beras. Alasannya, para pengusaha beras membutuhkan kepastian regulasi terkait dengan harga gabah maupun beras.

"Ini yang ditunggu oleh pelaku usaha bisnis beras. Ketetapan pasti selalu ditunggu untuk lancar-

nya bisnis beras," ujar Sutarto.

Menurutnya, penetapan HPP GKP sebesar Rp6.000 per kg di tingkat petani tidak serta-merta membuat harga beras melonjak. Kenaikan harga beras dalam setahun terakhir, kata dia, lebih disebabkan oleh faktor pasokan yang terbatas. "Kalau penyediaan cukup ya harga akan stabil," ucapnya.

Akan tetapi, Sutarto menyatakan pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi HPP gabah maupun HET beras di masyarakat.

TIDAK TEPAT

Sebaliknya, para petani justru merasa kecewa dengan penetapan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp6.000 per kg. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengangap penetapan HPP gabah oleh Bapanas tidak tepat.

Menurutnya, penetapan HPP gabah sama sekali tidak melindungi harga di tingkat petani. Sebaliknya, penetapan HPP gabah saat ini justru menyulitkan petani mendapat harga yang lebih tinggi pada periode panen selanjutnya.

"Saya pikir timingnya tidak tepat untuk melindungi petani, karena masa panen raya sudah selesai," ujar Henry.

Pada paruh kedua 2024, ungkapnya, petani mulai memasuki panen musim gadu yang produksinya tidak akan sebanyak saat panen raya di semester I/2024. Biasanya saat panen di musim kemarau, dia menegaskan harga gabah petani cenderung akan lebih tinggi karena pasokan yang minim.

Menurutnya, HPP GKP sebesar Rp6.000 per kg dianggap belum memberikan keuntungan bagi petani.

Saat ini, biaya produksi petani sudah menyentuh Rp6.000 per kg GKP. Dengan HPP GKP sebesar Rp6.000 per kg,

petani hanya bisa balik modal alias tidak untung.

Di sisi lain, aturan HPP baru tidak memberikan jaminan terhadap risiko gabah petani dibeli dengan harga rendah di bawah HPP.

"Seperti panen raya kemarin masih ditemui harga gabah di bawah HPP Rp5.500 [per kilogram]," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia meminta HPP di petani seharusnya ditetapkan sebesar Rp7.000 per kg.

"Menurut kami, kalau untuk persiapan antisipasi panen raya 2025, HPP ini tidak sesuai dengan tuntutan kita, karena biaya produksi gabah itu sudah mencapai Rp6.000 modalnya. Harusnya HPP Rp7.000 per kilogram," ucapnya.

Henry menyatakan penetapan HPP GKP sebesar Rp6.000 per kg hanya menguntungkan produsen beras besar. Menurutnya, para produsen beras berpeluang mendapatkan margin yang besar berkat adanya HET beras terbaru, khususnya beras premium.

"Bagi produsen besar para pedagang beras, baik itu yang terlibat sampai ke bisnis ritel, ini [HPP GKP] merupakan kesempatan karena dia bisa menjual beras dengan HET," kata Henry.

Jarak antara HPP gabah dengan HET beras, kata dia, terlalu jauh. Alih-alih dinaikkan, HET beras seharusnya bisa lebih ditekan agar margin antara harga gabah dengan harga beras tidak begitu besar.

Di sisi lain, dia juga mengurangkan pengawasan pemerintah terhadap implementasi HPP gabah maupun HET di masyarakat.

"Tentunya menurut kita kalau melindungi petani, pemerintah belum berhasil, karena ternyata pada masa panen raya HPP tidak berjalan, HET juga saat panen raya masih banyak beras dijual di atas HET, apalagi nanti mau masuk musim kemarau ini," ungkapnya. (Hendra Wibawa)

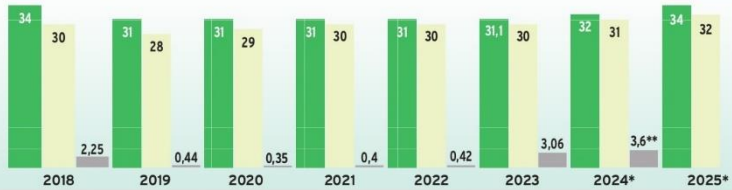
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras Per 5 Juni 2024

Kategori	HPP (Rp/kg)	Keterangan
GKP petani	6.000	Kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%
GKP penggilangan	6.100	Kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%
GKG penggilangan	7.300	Kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%
GKG gudang Bulog	7.400	Kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%
Beras gudang Bulog	11.000	Derajat sosoh min. 95%, kadar air mak. 14%, butir patah mak. 20%, butir menir mak. 2%

Ket: GKG: gabah kering giling, GKP: gabah kering panen

Produksi, Kebutuhan dan Realisasi Impor Beras 2018-2025 (juta ton)

■ Produksi beras ■ Kebutuhan beras ■ Realisasi impor beras



Sumber: Perbadan No.5/2024, Perbadan No.4/2024, Kementerian diolah dari BPS, 2023

* proyeksi BPS dan Kementerian, ** Kuota

Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras di Indonesia per 5 Juni 2024 (Rp/kg)

Wilayah	Beras Medium	Beras Premium
Jawa, Lampung, dan Sumsel	12.500	14.900
Aceh, Sumatra non-Lampung dan Sumsel	13.100	15.400
Bali dan NTB	12.500	14.900
NTT	13.100	15.400
Sulawesi	12.500	14.900
Kalimantan	13.100	15.400
Maluku	13.500	15.800
Papua	13.500	15.800

BISNIS/RADITYO EKO

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERAN

Title	Kota Semarang Deflasi, Mba Ita Minta Semua Pihak Tetap Waspada	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	12	
Author	BBS	

| PENGENDALIAN INFLASI DAERAH |

Kota Semarang Deflasi, Mbak Ita Minta Semua Pihak Tetap Waspada



Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (*tengah*) memimpin Rapat Koordinasi Inflasi Mei 2024 dan Mitigasi Pengendalian Inflasi Juni 2024 di Balai Kota Semarang, Kamis (6/6).

Kota Semarang mengalami deflasi sebesar 0,21 persen pada Mei 2024.

Komoditas penyumbang deflasi di Kota Semarang antara lain kelompok makanan-minuman, tembakau, transportasi, dan perumahan, air, listrik.

Sedangkan gabungan wilayah di Jawa Tengah mengalami deflasi seiring penurunan harga komoditas pangan utama sebesar 0,22 persen bulanan (*month to month/MtM*) atau 2,66 persen tahunan (*year-on-year/YoY*) pada Mei 2024. Komoditas penyumbang deflasi di Jateng adalah beras, daging ayam ras, tomat, angkutan antar kota dan cabai rawit.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta semua pihak tetap waspada terhadap risiko inflasi di kemudian hari, meskipun saat ini terjadi deflasi. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah sayur buncis yang sedang mengalami tren kenaikan harga dan bisa menjadi pemicu kenaikan inflasi.

Selain itu, Mbak Ita sapaan akrabnya, juga terus mendorong pemantauan stok cabai dan bawang merah,

mengingat komoditas pangan itu juga menjadi salah satu faktor kenaikan inflasi di samping BBM dan tiket transportasi seperti kereta api dan pesawat.

Mbak Ita juga meminta kepada jajarannya untuk menyiapkan skema-skema pengendalian inflasi di bulan Juni ini. Sebagai upaya menekan angka inflasi, dirinya pun telah merancang skema seperti menurunkan subsidi pangan di samping pantauan stok dan harga cabai dan bawang merah.

“Pemicu deflasi saat ini salah satunya harga beras turun. Kalau pemicu inflasi bawang merah cabai. Tapi cabai ini surplusnya lima hari, termasuk bawang merah tapi tanggal 17 ini Idul Adha, nah ini makanya kita harus pacu untuk bisa segera ada stok sehingga tidak ada terjadi gejolak harga bahan pokok,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Inflasi Mei 2024 dan Mitigasi Pengendalian Inflasi Juni 2024 di Balai Kota Semarang, Kamis (6/6/2023).

Lebih lanjut, Mbak Ita berharap peran Lurah Pasar dalam keterlibatan menjaga ketersediaan stok dan harga bahan pangan, dengan memaksimalkan perannya.

Ke depan, ia telah mengajak Bank Indonesia untuk supervisi terkait peran Lurah Pasar.

Ita menyebut contoh pengendalian inflasi di Bandung dan Jakarta yang bertumpu pada pemantauan terhadap rantai distribusi. Rantai pasok di Bandung tidak terlalu panjang karena didukung oleh area perkebunan penghasil beragam komoditas yang berlokasi tidak jauh dari kota. Sementara itu, Jakarta memiliki food station yang dikelola oleh Pasar Jaya.

“Nah ini kita harus support dan saya minta kepada BPKAD untuk menginventarisasi kalau bisa nanti dapat insentif untuk penanam cabai dan bawang sehingga ketersediaan stok bahan pokok bisa terjamin di Kota Semarang,” imbuhnya.

Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengendalian inflasi terus menggenjot Gerakan Pasar Murah. Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman) akan digelar sebanyak 23 kali pada Juni 2024. Selain itu juga dilakukan optimalisasi kios TPID. Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Semarang terkait gerakan menanam tanaman lokal pengganti beras juga terus digencarkan. (BBS)

Title	Bansos Beras Lanjut Sampai Desember	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	DIR	

Pemerintah Kucurkan Rp 9 Triliun

Bansos Beras Lanjut Sampai Desember

PEMERINTAH bakal melanjutkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat hingga Desember 2024. Program bansos ini diyakini bakal mengurangi ketimpangan sosial.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Pemerintah menyiapkan Rp 9 triliun untuk penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) bagi 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Bantuan pangan (beras 10 kg) ini sudah diputuskan dalam rapat internal bersama Pak Presiden, dilanjutkan bulan 8 (Agustus), 10 (Oktober) dan bulan 12 (Desember). Anggarannya

sekitar Rp 9 triliun," kata Arief, Sabtu (8/6/2024).

"Tahun lalu kan juga nggak *full* 12 bulan, tahun ini dilanjutkan tahap tiga untuk bulan 8, 10 dan 12 karena Pak Presiden selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan akan melihat postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga," terang Arief.

Menurutnya, pemberian bansos itu juga sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan berbagai pertimbangan.

"Kita lihat juga fiskal, jangan hanya untuk pemenuhan bantuan pangan, tapi kegiatan lain yang penting juga jangan sampai tertinggal. Itu keputusannya dalam

rapat kabinet," jelas Arief.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, dalam sasaran pembangunan tahun 2025 ditargetkan tingkat ketimpangan sosial bisa berkurang di angka 0,379 sampai 0,382.

"Ketimpangan bisa berkurang, rasio Gini pada tingkat 0,379 sampai 0,382 dan tingkat pengangguran terbuka 4,5 persen sampai 5,0 persen," kata Suharso dalam rapat bersama DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Karena itu, untuk mencapai

target angka ketimpangan tersebut ada sejumlah program yang akan terus dilaksanakan oleh pemerintahan baru pada tahun depan. Antara lain integrasi bansos, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif.

Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan program inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya.

Kemudian, melanjutkan atau terus melakukan program satu sistem registrasi sosial ekonomi (regsosek), program reformasi sistem jaminan sosial nasional, dan program pengembangan ekonomi perawatan untuk perluasan, perlindungan sosial dan

kesejahteraan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan keberadaan bantuan pangan berupa beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

"Ini patut disyukuri. Semua negara sedang kesulitan karena kenaikan harga pangan," kata Jokowi.

Jokowi juga menekankan pentingnya dukungan pangan dari Pemerintah terhadap masyarakat di tengah kenaikan harga pangan global. Dia memastikan bantuan beras 10 kg telah disalurkan secara berkala dan akan terus diberikan hingga Juni 2024, dengan harapan dapat diteruskan hingga Desember. ■ DIR

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	DIALOG DENGAN PEDAGANG SEMBAKO	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	Antara/Makna Zaezar	



ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nz

DIALOG DENGAN PEDAGANG SEMBAKO:

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (kiri) berdialog dengan pedagang sembako saat melakukan inspeksi di Pasar tradisional Karang Ayu, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/6/2024). Inspeksi Mendag di pasar tradisional tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan sembako dan harga-harga kebutuhan pokok seperti ayam potong, beras, telur, cabe, bawang merah dan putih menjelang hari raya Idul Adha 1445 Hijriah.

Tittle	Visi Menteri Amran Dipuji Menteri Tito	
Date	10 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	KAL	

Wujudkan Swasembada Pangan Visi Menteri Amran Dipuji Menteri Tito

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengacungkan jempol untuk terobosan bernas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mewujudkan swasembada pangan. Apalagi, Indonesia sebagai negara beriklim tropis sangat berpeluang mewujudkan swasembada pangan ketimbang negara lain yang memiliki empat musim.

“Kita bisa sepanjang tahun, kita cukup air, kita memiliki tanah yang subur, lebih dari 100 volcano, dan banyak sekali sebetulnya peluang tenaga kerja lagi cukup banyak untuk mewujudkan harapan dari visi Pak Mentan itu,” ujar Tito saat acara penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kemendagri dan Kementan terkait program cetak sawah rakyat di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Mendagri menegaskan, swasembada pangan bukan persoalan mudah karena harus melibatkan banyak pihak, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda).

Ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan pemda untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pertama, pengembangan infrastruktur pertanian. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani. Ketiga, di-

versifikasi pertanian dan nilai tambah. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Kelima, pemantauan dan evaluasi.

“Kami harus mengajak semua daerah ini semua paralel bekerja, mendongkrak pertanian wilayahnya masing-masing. Kemudian dari Pemerintah Pusat memberikan dukungan dorongan memetakan mana yang perlu mendapat dukungan dan mana yang tidak,” tegasnya.

Tito memberikan apresiasi atas terobosan Kementan dalam meningkatkan produksi pangan. Bahkan, di era Menteri Amran swasembada pangan dapat terwujud. Dia pun mengaku kagum karena Amran memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam mencapai kemandirian pangan.

“Yang saya tahu, di zaman Pak Jokowi swasembada itu bermula di tangan beliau (Andi Amran Sulaiman). Dan sekarang semangat beliau kembali menggelora,” ujarnya.

Tito mengatakan, semangat Amran dalam menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sangat mungkin terwujud mengingat saat ini angkatan kerja kita terbesar di dunia. Di samping itu, potensi sumber daya alam Indonesia sangat melimpah sehingga upaya perluasan areal tanam atau PAT sangatlah tepat. ■ KAL



SALAM KOMANDO: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai acara penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian terkait program cetak sawah rakyat di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Tittle	Harga Gabah Petani Mulai Menjauh dari HPP Baru	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	10	
Author	TI	

Harga Gabah Petani Mulai Menjauh dari HPP Baru

JAKARTA, ID—Sebagian petani di Tanah Air saat ini menjual gabah kering panen (GKP) di kisaran Rp 7.000-7.500 per kilogram (kg). Artinya, harga GKP petani sudah mulai menjauh dari ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) yang baru saja ditetapkan Rp 6.000 per kg. Hal itu terjadi seiring puncak panen raya padi yang telah berlalu. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) resmi menetapkan HPP GKP di petani Rp 6.000 per kg, sama seperti ketentuan fleksibilitas yang berlaku sejak 3 April 2024.

Kebijakan HPP baru termuat di Peraturan Bapanas (Perbadan) No 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbadan No 06 Tahun 2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Rinciannya, HPP GKP di petani Rp 6.000 per kg (kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%), GKP di penggilingan Rp 6.100 per kg (kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%), dan gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp 7.300 per kg (kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%). Lalu, GKG di gudang Perum Bulog Rp 7.400 per kg (kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%), beras di gudang Perum Bulog Rp 11 ribu per kg (derajat sosooh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 20%, dan butir menir maksimal 2%).

HPP gabah dan beras baru itu sama besar dengan kebijakan fleksibilitas dalam Keputusan Kepala Bapanas RI No 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Dengan penetapan HPP itu, harga batas bawah pembelian gabah/beras oleh Bulog bisa menjaga dan melindungi harga dasar di petani. Fleksibilitas HPP diberlakukan per 3 April 2024 hingga sedianya 30 Juni 2024. HPP gabah dan beras yang baru menjadi instrumen yang bisa melindungi kepentingan petani di hulu sehingga harga tidak jatuh di tingkat produsen dan dasar bagi Bulog mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani domestik.

Menurut Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional HM Yadi Sofyan Noor, HPP GKP baru Rp 6.000 per kg di bawah usulan KTNA Rp 6.500 per kg. KTNA meminta para petani dalam jaringan asosiasi itu untuk sementara menerima kebijakan baru tersebut, meski tidak menutup kemungkinan bagi KTNA bersurat lagi ke Bapanas agar HPP disesuaikan dengan besaran ideal Rp 6.500 per kg. *Tob*, saat ini, petani di lapangan banyak yang menerima harga Rp 7.000-7.500 per kg untuk GKP karena panen raya sudah berlalu. *Di* lapangan, sebagian wilayah kini memang masih panen, tapi sudah menurun ya intensitasnya, fase ramai-ramainya (puncak panen) sudah lewat. Kini, GKP petani ada yang beli Rp 7.000 per kg, bahkan Rp 7.500 per kg,” tutur Sofyan kepada *Investor Daily*, Minggu (09/06/2024).

KTNA sempat bersurat ke Bapanas dengan usulan HPP GKP petani Rp 6.500 per kg, meski akhirnya keluar perbadan yang menetapkan Rp 6.000 per kg. “Sementara kami minta teman-teman di lapangan menerima dulu. Yang penting, ini bukan fleksibilitas, tapi betul-betul HPP (permanen), sehingga kepastian hukumnya jelas,” kata Sofyan. Usulan HPP Rp 6.500 per kg mempertimbangkan *net profit* petani 20%, dengan ditetapkan Rp 6.000 per kg maka *net profit* petani hanya 10%. “Sebelum mengusulkan Rp 6.500 per kg, hitungan HPP GKP ideal kami Rp 7.000 per kg, tapi waktu itu teman-teman di Jawa Barat bilang Rp 6.500 per kg masih aman. Dengan HPP Rp 6.000 per kg, *net profit* tinggal 10%, tapi kami bersyukur daripada tetap Rp 5.000 per kg. Artinya, ini enggak tersentuh ke bawah, malah naik,” jelas Sofyan.

Jaring Pengaman

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan, penetapan HPP gabah dan beras itu telah melalui diskusi panjang bersama pemangku kepentingan perberasan serta memperhatikan berbagai sisi pada tiga lini, yakni produsen, pedagang, dan konsumen. Bapanas berharap HPP baru itu dapat menjadi jaring pengaman bagi produsen gabah dan beras, sehingga harga tidak terlampau turun jauh saat panen. Komponen biaya produksi seperti benih, pupuk, hari orang kerja, sewa lahan, dan seterusnya saat ini naik dan harus disikapi dengan baik. “Kita tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi penetapan HPP ini tentu berdasarkan masukan, diskusi, dan tanggapan berbagai *stakeholder* perberasan dan mempertimbangkan keseimbangan harga hulu-hilir,” ujar dia. Dalam Perbadan No 04 Tahun 2024 juga mengatur rafaksi harga, sehingga gabah dan beras yang tidak sesuai kualitas ditentukan maka Bulog tetap bisa menyerapnya.

Seiring penetapan HPP gabah dan beras, pemerintah pun merilis harga eceran tertinggi (HET) beras medium-premium demi menjaga harga wajar di konsumen. Ketentuan itu tertuang dalam Perbadan No 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbadan No 07 Tahun 2023 tentang HET Beras, yakni harga beras medium dan premium diatur sesuai wilayah. Arief menegaskan, penyesuaian HET beras tidak terpisahkan dari upaya stabilisasi pasokan dan harga, kebijakan di hulu selaras dengan di hilirnya. “Penting bagi kami menjaga keseimbangan antara kepentingan hulu-hilir terkait HPP gabah dan beras. Harga di produsen (petani) harus sejalan dengan di konsumen,” jelas Arief seperti dikutip *Antara*. (tl)

Title	Operasi Pasar Membuat Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil	
Date	10 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	10	
Author	Ant	



ANI

Operasi Pasar Membuat Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil

Pedagang telur melayani pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Minggu (9/6/2024). Kemdag telah menggelar program operasi pasar di berbagai pasar tradisional sehingga dapat menjaga harga kebutuhan pokok relatif stabil menjelang Idul Adha 1445 Hijriah.

Tittle	HET Dikerek, Harga Beras Bakal Naik	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Lailatul Anisah	

■ PANGAN

HET Dikerek, Harga Beras Bakal Naik

JAKARTA. Siap-siap harga beras bakal tetap tinggi di pasaran. Hal ini setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi mengerek harga eceran tertinggi (HET) beras yang tertuang dalam Peraturan Bapanas (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2024.

Dengan terbitnya beleid ini, kenaikan harga beras yang ditetapkan melalui relaksasi HET sebelumnya resmi berlaku secara permanen. "Penetapan regulasi ini untuk menguatkan kebijakan relaksasi

stakeholder perberasan dari hulu hingga hilir," ucap dia.

Arief mengakui proses penetapan HET beras mengalami berbagai dinamika, diskusi dan mempertimbangkan berbagai aspek.

Di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan, HET beras medium senilai Rp 12.500 per kilogram (kg) dan HET beras premium Rp 14.900 per kg. Kemudian untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg.

Untuk wilayah Bali dan NTB, HET beras medium Rp 12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg. Di wilayah NTT, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg. Untuk wilayah Sulawesi, HET beras medium di patok Rp 12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg.

Di Kalimantan, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg. Di Maluku, HET beras medium Rp 13.500 per kg dan HET beras premium Rp 15.800 per kg. Adapun di Papua, HET beras medium Rp 13.500 per kg dan HET beras premium Rp 15.800 per kg.

Lailatul Anisah

Penyesuaian HET sudah dibahas bersama seluruh pihak yang terkait.

yang telah diberlakukan sebelumnya," ungkap Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Sabtu (8/6).

Ia menegaskan penyesuaian HET beras tidak terpisahkan dari upaya stabilisasi pasokan dan harga beras, di mana kebijakan di tingkat petani juga selaras dengan di hilir atau di tingkat konsumen.

"Bahwa keseimbangan hulu-hilir memang tidak mudah, tapi ini tantangan yang harus kita jawab dengan melibatkan



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

BIRO H Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menerbitkan peraturan anyar Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

LIK

Title	Mengatasi Limbah Industri Peternakan
Date	10 Juni 2024
Media	Kompas
Page	8
Author	Deonista Arlinta



Kementerian Pertanian

Mengatasi Limbah Industri Peternakan

Peneliti Fakultas Peternakan UGM mengembangkan inovasi untuk mengurangi dampak limbah ternak dengan bahan lokal.

Deonista Arlinta

Untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk dunia yang terus meningkat, produksi pangan secara keseluruhan harus terus ditingkatkan. Bahkan, produksi pangan harus ditingkatkan hingga 70 persen dari produksi pangan saat ini untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dunia pada 2050.

Peningkatan produksi pangan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan nutrisi hewan yang berasal dari ternak yang dibudidayakan. Peternakan punya potensi yang sangat besar sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat.

Protein hewani ini pun amat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Protein itu berasal dari daging ternak, seperti ayam, sapi, dan kambing, yang kaya akan asam amino esensial. Tidak hanya itu, produk turunan lain dari hewan ternak, seperti susu, keju, dan yoghurt, juga baik untuk menunjang kesehatan masyarakat.

Limbah peternakan

Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya produksi ternak, konsekuensi dari dampak limbah pada industri peternakan akan semakin besar. Badan Pusat Statistik pada 2023 melaporkan, jumlah populasi ternak sapi potong di Indonesia kini mencapai 18,6 juta ekor.

Sapi-sapi ini serta jenis ternak lain menghasilkan limbah dalam volume besar dari kotoran, urine, dan limbah dari hasil ikutan lain, seperti bulu.

Limbah tersebut dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Salah satu limbah yang paling sering dikeluhkan masyarakat, yakni limbah kotoran ayam. Ekskreta atau kotoran dari ayam yang mengandung amonia jika tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini dapat menjadi polusi udara di masyarakat.

Selain itu, limbah dari industri peternakan juga bisa menyebabkan pencemaran air, baik air tanah maupun air permukaan, akibat dari limbah feses



ternak, urine, serta bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan kandang ternak. Limbah gas pun dapat dimanfaatkan untuk memproduksi biogas yang dapat digunakan untuk memasok listrik skala kecil.

Bahkan, dari penelitian sebelumnya, diketahui biogas yang telah dipurifikasi untuk menghilangkan karbon dioksida (CO₂), air (H₂O), dan hidrogen sulfida (H₂S) memiliki peluang sebagai bahan bakar kendaraan bermotor.

Nanung menyampaikan, ternak unggas merupakan salah satu jenis ternak yang bau kotornya paling tidak disukai masyarakat. Bau tak sedap dari kotoran tersebut disebabkan adanya senyawa gas amonia yang diemisikan dari ekskreta atau kotoran dari unggas. Bau yang ditimbulkan dari kotoran tersebut menjadi masalah pencemaran lingkungan, terutama pada peternakan ayam petelur.

"Bau ini disebabkan adanya konversi protein pakan yang terkandung sebagai produk pengkondisi pakan yang kurang efisien," tuturnya saat menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Peternakan UGM pada awal Maret 2024. Semakin tinggi protein pada pakan, ekskreta ternak akan semakin bau.

Proses dekomposisi feses oleh mikroorganisme yang membentuk gas amonia (NH₃), nitrat (NO₃), nitrit (NO₂), serta gas sulfida (H₂S) dari kotoran ternak yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Penambahan agen penghambat urease atau urease inhibitor pada ekskreta ayam petelur dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran dari gas amonia.

Buah maja

Guru Besar Fakultas Peternakan UGM Nanung Agus Fitrianto, yang juga meneliti berbagai inovasi untuk mengurangi dampak limbah peternakan, menuturkan, limbah peternakan berupa limbah padat umumnya bisa diolah untuk pengomposan serta medium pengembangbiakan lalat tentara hitam (BSF). Larva dari lalat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Selain itu, inovasi lain juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah limbah cair ternak sebagai pupuk cair organik. Limbah gas pun dapat dimanfaatkan untuk memproduksi biogas yang dapat digunakan untuk memasok listrik skala kecil.

Bahkan, dari penelitian sebelumnya, diketahui biogas yang telah dipurifikasi untuk menghilangkan karbon dioksida (CO₂), air (H₂O), dan hidrogen sulfida (H₂S) memiliki peluang sebagai bahan bakar kendaraan bermotor.

Nanung menyampaikan, ternak unggas merupakan salah satu jenis ternak yang bau kotornya paling tidak disukai masyarakat. Bau tak sedap dari kotoran tersebut disebabkan adanya senyawa gas amonia yang diemisikan dari ekskreta atau kotoran dari unggas. Bau yang ditimbulkan dari kotoran tersebut menjadi masalah pencemaran lingkungan, terutama pada peternakan ayam petelur.

"Bau ini disebabkan adanya konversi protein pakan yang terkandung sebagai produk pengkondisi pakan yang kurang efisien," tuturnya saat menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Peternakan UGM pada awal Maret 2024. Semakin tinggi protein pada pakan, ekskreta ternak akan semakin bau.

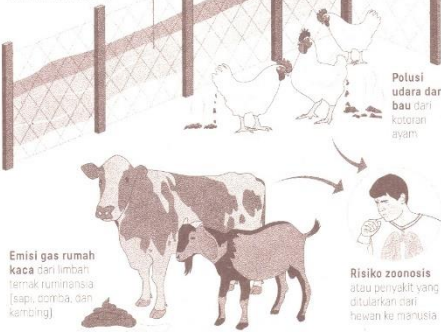
Proses dekomposisi feses oleh mikroorganisme yang membentuk gas amonia (NH₃), nitrat (NO₃), nitrit (NO₂), serta gas sulfida (H₂S) dari kotoran ternak yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Penambahan agen penghambat urease atau urease inhibitor pada ekskreta ayam petelur dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran dari gas amonia.

Buah maja

Inovasi untuk Atasi Limbah Industri Peternakan

Dampak limbah industri peternakan

Pencemaran air dari kotoran ternak, urine, dan bahan kimia dari pembersihan kandang



Infografis: Nanung Agus Fitrianto, Guru Besar Fakultas Peternakan UGM, dan Agus Fitrianto, Guru Besar Fakultas Peternakan UGM, 10 Juni 2024

Inovasi yang bisa dilakukan

- Sistem penanganan limbah cair dengan **bioremediasi limbah cair**. Pada sistem ini, memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurai limbah cair bisa digunakan kembali menjadi pupuk cair, bahan pakan, dan bahan baku industri.
- **Penambahan agen penghambat urease pada kotoran** (ekscreta) ayam petelur dengan ekstrak buah maja. Senyawa marmelosin pada buah maja dapat menghambat bau pada kotoran ayam petelur.
- **Energi biogas** dari hasil pengolahan feses sapi perah. Biogas yang dihasilkan dapat menjadi sumber energi untuk memasak listrik dan panas bagi peternakan dan lingkungan sekitar.
- **Penambahan enzim hasil mikroorganisme untuk mencerna bulu unggas** menjadi produk dengan nilai tambah secara ekonomi.

Dukungan yang dibutuhkan untuk solusi penanganan limbah peternakan

- Kombinasi dari inovasi teknologi yang sudah dihasilkan
- Manajemen penanganan limbah yang efektif
- Dukungan regulasi
- Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam rantai industri peternakan

K

DOI: 10.30605/INOVASIIPTEK.V1I1.1

gunakan sebagai alternatif agen penghambat urease. Tanaman maja memiliki senyawa bioaktif, yakni senyawa marmelosin. Senyawa tersebut merupakan senyawa metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antibakteri alami.

Potensi marmelosin sebagai antibakteri dijadikan dasar sebagai agen urease inhibitor dalam menghambat atau menurunkan aktivitas enzim urease. "Hal inilah yang akan mencegah, menghambat, ataupun mengurangi pembentukan amonia oleh enzim urease," tutur Nanung.

Dalam penelitian sebelumnya, buah maja muda mengandung senyawa marmelosin 188,65 mikrogram per gram. Pada buah maja tua mengandung marmelosin 65,83 mikrogram per gram dan buah maja terfermentasi 23,02 mikrogram per gram. Senyawa itu mampu membantu menghambat pertumbuhan bakteri urease penghasil amonia.

"Dengan kata lain, senyawa marmelosin pada buah maja ini dapat menjadi agen urease inhibitor yang mampu meminimalkan bau pada peternakan ayam petelur," katanya.

Prioritas

Menurut Nanung, penanganan limbah industri peternakan harus menjadi salah satu agenda prioritas yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menghindari permasalahan sosial dari limbah yang dihasilkan. Dengan penanganan yang baik keberlanjutan industri peternakan bisa terjaga.

Untuk menangani limbah industri peternakan dibutuhkan perhatian masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain. Komunitas yang menjadi representasi masyarakat dapat berperan aktif untuk mengontrol aktivitas industri peternakan. Pemerintah pun bisa menunjang penanganan limbah dengan memberikan aturan dan regulasi yang jelas yang

dapat digunakan oleh industri untuk melaksanakan aktivitasnya secara berkelanjutan. Secara terpisah, Dekan Fakultas Peternakan UGM Budi Guntoyo menuturkan, industri peternakan kian berkembang. Ia pun mendorong agar berbagai pihak yang berperan di bidang peternakan bisa semakin berperan untuk meningkatkan hasil produksi ternak, baik daging, susu, telur, maupun produk lain.

"Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi insan-insan peternakan di Tanah Air untuk berkibar. Bidang peternakan ini mulai bangkit lagi," tuturnya dalam siaran pers pekan lalu.

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	214 Tim Pemeriksa Hewan Kurban di Karawang	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Bandung Ekspres	
Page	6	
Author	Sis/rie	

214 Tim Pemeriksa Hewan Kurban di Karawang

KARAWANG - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang melepas sebanyak 214 orang yang masuk ke dalam Tim Pemeriksa Hewan Kurban tahun 2024/1445 Hijriah.

Kepala DPKP Karawang Rohman, menyampaikan, pemeriksaan hewan tersebut bertujuan untuk mendapatkan hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi sesuai syariat Islam untuk menuju kehalalan dan thayyiban.

“Sehingga diharapkan memberikan ketentraman bathin kepada masyarakat penerima daging kurban,” ujar Rohman.

Ia menjelaskan, jumlah hewan kurban pada tahun 2023 yang diperiksa sebanyak 13.632 ekor, terdiri dari sapi 4.326 ekor, kerbau 4 ekor, domba 8.838 ekor dan kambing 464 ekor.

Sedangkan yang dipotong sebanyak 15.129 ekor, terdiri dari sapi 4.612 ekor, kerbau 4 ekor, domba 10.070 ekor dan kambing 443 ekor.

“Ada perbedaan antara yang diperiksa dan dipotong dimana jumlah yang dipotong lebih banyak. Hal ini dikarenakan adanya shobibul kurban yang membeli diluar Karawang,” kata Rohman.

Ia menerangkan, mengenai persyaratan hewan kurban berdasarkan syariat Islam telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 adalah sehat, tidak cacat, tidak kurus, berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar legkap dua buah dengan bentuk dan letak yang simetris, dan cukup umur.

“Kalau domba atau kambing diatas satu tahun, ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Kalau sapi atau kerbau diatas dua tahun itu, ditandai tumbuhnya sepasang gigi tetap,” jelas Rohman.

Lebih lanjut, ia mengatakan, rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban tahun 2024 meliputi, pelepasan tim pemeriksa kesehatan kurban yang dilaksanakan oleh Bupati Karawang, pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban akan dilaksanakan H-10 dimulai hari ini.

“Dilanjutkan H-1 untuk pemeriksaan antr mortem atau pemeriksaan sebelum pemotongan. Lanjut lagi pada hari raya Idul Adha untuk pemeriksaan setelah disembelih atau pemeriksaan post mortem,” ucap Rohman.

Untuk jumlah Tim Pemeriksa Hewan Kurban yang akan diterjunkan ke lapangan sebanyak 214 orang, terdiri dari Tim Kabupaten 22 orang dan Tim Kecamatan 192 orang yang tersebar di 30 kecamatan se-Kabupaten Karawang.

“Jadi himbauan kami, belilah hewan kurban yang telah ditandai dengan kalung sehat, karena telah diperiksa kesehatannya oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban Karawang,” tegas Rohman.

(sis/rie)

Title	Dampak Kekeringan makin Meluas	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	10	
Author	Akhmad Safuan	

Dampak Kekeringan makin Meluas

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kekeringan. Selain itu, BPBD Tasikmalaya telah diinstruksikan untuk melakukan pendataan warga yang mengalami krisis air bersih.

AKHMAD SAFUAN

safuan@mediaindonesia.com

DAMPAK kekeringan semakin meluas di berbagai wilayah, terutama di Jawa Tengah. Kekeringan di wilayah itu sudah melanda Semarang, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, dan Temanggung. Bantuan air bersih pun didistribusikan bagi daerah yang mengalami krisis air bersih.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, daerah yang telah mendistribusikan bantuan air bersih, yakni Kabupaten Cilacap sebanyak 60 ribu liter, Kabupaten Semarang sebanyak 5 ribu liter, dan Kabupaten Pati 12 ribu liter. "Total telah didistribusikan 77 ribu liter air bersih," kata Kepala Pelaksana BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan, kemarin.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cilacap Budi Setyawan mengatakan ada 775 keluarga atau 2.888 jiwa yang

terdampak krisis air bersih.

"Hingga kini, ada enam desa yang berada di empat kecamatan mengalami krisis air bersih. Enam desa tersebut adalah Bojong dan Ujungmanik di Kecamatan Kawunganten, Cimrutu, dan Rawaapu, Kecamatan Patimuan, Desa Gintungreja, Kecamatan Gandrungmangu, dan Desa Rawa-jaya, Kecamatan Bantarsari," jelasnya, kemarin.

Di Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Selain itu, BPBD Tasikmalaya telah diinstruksikan untuk melakukan pendataan warga yang mengalami krisis air bersih.

"Kami meminta agar BPBD harus secepatnya turun tangan melakukan pendataan, terutama untuk masyarakat yang mengalami kekeringan, agar bantuan air bisa secepatnya diberikan. Sudah ada beberapa kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih dan petugas harus secepatnya turun tangan," kata Bupati Tasikmalaya Ade

Sugianto.

Perbaiki irigasi

Di sisi lain, untuk mengantisipasi keringnya lahan pertanian pada musim kemarau, Pemkab Cianjur memetakan kerusakan jaringan irigasi di wilayah tersebut agar segera dapat diperbaiki.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur Eri Rihandiar tak memungkiri masih cukup banyak jaringan irigasi yang kondisinya memprihatinkan. Penyebab kerusakan dipicu berbagai faktor, di antaranya usia, teknis, dan bencana alam. "Pasti ada (irigasi) yang rusak," kata Eri kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan sebanyak 13.648 hektare rawa bisa dialihkan menjadi lahan tanam padi sebagai upaya menggenjot produktivitas. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kekeringan pada tahun ini.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel Imran Jausi mengatakan kekeringan pada tahun lalu sangat berdampak pada penurunan produksi padi.

"Apa yang kita lakukan sekarang ini dari target kita dari 13.648 ha rawa yang kita jadikan lahan tanam padi, minimal kita naikan indeks

tanamnya dari 100 ke 200, kalau bisa ke 300," kata Imran.

Siaga karhutla

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kepulauan Bangka Belitung terjun memantau *hotspot* atau titik panas guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau ini. Hal itu dilakukan mengingat Babel merupakan salah satu provinsi yang rawan karhutla.

"Bukan di provinsi saja, tapi BPBD kabupaten/kota juga sudah kita minta untuk bersiaga," ujar Kepala Pelaksana BPBD Babel Mikron Antariksa.

Di sisi lain, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengeluarkan peringatan tegas kepada pengguna jalan agar menghentikan kebiasaan membuang puntung rokok atau membakar lahan di pinggir jalan.

Peringatan tegas tersebut dikeluarkan BPBD Lembata berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 564 Tahun 2024 yang telah menetapkan status keadaan siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla.

Kepala Pelaksana BPBD Lembata Yohanes Solang Demo mengatakan peringatan tegas itu diterbitkan berdasarkan kajian terhadap penyebab kebakaran yang menimpa 78 areal hutan dan lahan pada tahun lalu. (LD/AD/BB/LN/RF/PT/J-3)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Harga Pangan Melonjak Distribusi Jadi Kunci	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	11	
Author	TB/RF/MY/Ant/E-2	

Harga Pangan Melonjak Distribusi Jadi Kunci

PENELITI Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, pemerintah perlu menjaga kelancaran distribusi dan pengawasan terhadap komoditas pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan barang pokok menjelang Idul Adha 2024.

“Hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga kelancaran distribusi dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi aksi spekulasi,” ujarnya.

Eliza menyebut beberapa komoditas seperti cabai merah, bawang, ayam ras, dan telur lebih banyak berasal dari Pulau Jawa. Sementara wilayah lainnya belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan suplai dari daerah lain.

Menurutnya, kelancaran pengiriman komoditas tersebut menjadi hal yang sangat penting, terlebih dari sisi biaya logistik. Biaya pengiriman yang mahal akan sangat berpengaruh pada harga komoditas.

“Kelancaran distribusi ini penting dan juga harus didukung dengan pembenahan biaya logistik agar efisien. Saat ini harga pengiriman antardaerah masih relatif mahal sehingga memengaruhi harga komoditas. Ini yang kerap menyebabkan disparitas harga antardaerah,” katanya.

Eliza menyampaikan, pendistribusian komoditas pangan akan lebih baik dan efisien jika didukung dengan ketersediaan data yang akurat dan valid.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai di Bangka,

Bengkulu, Padang Panjang, dan Palu merangkak naik. Di Palu, harga cabai rawit bahkan tembus Rp60 ribu per kilogram (kg), naik dari sebelumnya Rp55 ribu per kg.

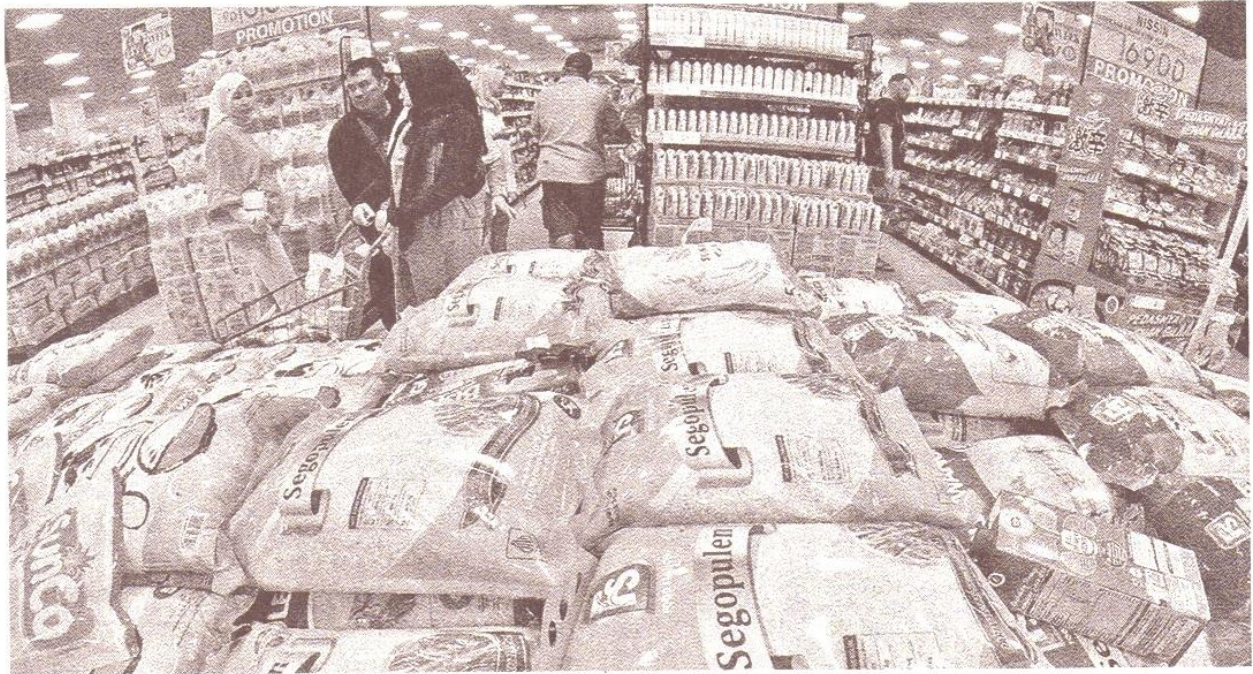
“Baru Jumat (7/6) lalu naik, ini naik lagi,” terang Daeng Anton, salah satu pedagang di Pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, kemarin.

Menurutnya, pasokan yang semakin hari semakin menipis jadi penyebab tingginya harga cabai rawit.

Kurangnya pasokan cabai rawit masuk ke pasar diakui pedagang karena sejumlah petani belum panen.

“Informasi dari pengepul seperti itu, banyak petani masih menunggu panen, maka itu stok masuk ke pasar berkurang,” ungkap pedagang lainnya, H Marlina. (TB/RF/MY/Ant/E-2)

Title	PENETAPAN HET BERAS	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	11	
Author	Agung Wibowo	



MI/AGUNG WIBOWO

PENETAPAN HET BERAS: Konsumen berbelanja kebutuhan pangan di Serpong, Banten, Sabtu (8/6). Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menetapkan peraturan tentang harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium demi menjaga kewajaran harga di tingkat konsumen.

Title	Badai PHK Masal Diprediksi Memengaruhi Jumlah Shahibul Qurban	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	11	
Author	Edo Rusyanto	

Badai PHK Masal Diprediksi Memengaruhi Jumlah *Shahibul Qurban*

JAKARTA, ID – Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memroyeksikan potensi ekonomi kurban Indonesia tahun 2024 sebesar Rp28,2 triliun yang berasal dari 2,16 juta pekurban (*shahibul qurban*).

Oleh Edo Rusyanto

Proyeksi tersebut naik dari tahun lalu (2023) yang diestimasikan mencapai Rp24,5 triliun dari 2,08 juta orang pekurban. Artinya, ada kenaikan sekitar 80 ribu pekurban pada tahun ini.

"Dari 2,16 juta keluarga muslim berdaya beli tinggi yang berpotensi menjadi *shahibul qurban*, kebutuhan hewan kurban terbesar adalah kambing-domba sekitar 1,21 juta ekor, sedangkan sapi-kerbau sekitar 587 ribu ekor," kata Tira Mutiara, peneliti IDEAS dalam keterangan tertulisnya pekan lalu.

Dengan asumsi berat kambing-domba berkisar 20-80 kg dengan berat karkas 41%, serta berat sapi-kerbau antara 250-750 kg dengan berat karkas 57%, potensi ekonomi kurban 2024 dari sekitar 1,79 juta hewan ternak ini setara dengan 117,2 ribu ton daging.

"Walaupun secara umum mengalami kenaikan, namun jika kita melihat data masyarakat muslim yang berpotensi menjadi pekurban kambing-domba dengan bobot 20-40 kg per ekor turun sekitar 7% dari 734 ribu menjadi 709 ribu pekurban. Kelompok ini merupakan masyarakat kelas menengah," ungkap Tira.

Menurut Tira, kondisi ekonomi saat ini dengan banyaknya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tingginya pengangguran menyebabkan pendapatan kelas menengah-bawah mengalami stag-

nansi bahkan penurunan signifikan.

Sehingga, kata dia, masyarakat yang mampu berkurban tahun lalu (2023), saat ini terdampak dengan fenomena tersebut tidak mampu bekurban lagi pada tahun ini.

"Secara kontradiktif kami menemukan adanya kenaikan pekurban sapi-kerbau dengan berat sekitar 750 kg per ekor, yang rata-rata berasal dari masyarakat kelas terkaya naik sekitar 21% dari 63,9 ribu menjadi 77,6 ribu pekurban," tutur Tira.

Dia menambahkan, fenomena turunnya pekurban masyarakat kelas menengah dan naiknya pekurban masyarakat kelas terkaya mengonfirmasi kesenjangan ekonomi yang semakin ekstrem di Indonesia.

Terpisah, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Surabaya optimis penjualan sapi menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah meningkat 20% dibandingkan dengan momen serupa tahun 2023.

"Tahun ini kami optimis penjualan bisa meningkat menjadi 100 ekor atau sekitar 20% dari tahun lalu," kata Direktur Utama Perusahaan Daerah RPH Kota Surabaya Paji Arifanto Fungrobo di Surabaya, Sabtu (8/6/2024).

Pada tahun lalu jumlah sapi yang terjual untuk keperluan kurban berada di angka 71 ekor.

Optimisme peningkatan jumlah penjualan hewan kurban itu dipengaruhi sejumlah kondisi tertentu,

salah satunya adalah kemunculan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) maupun *lumpy skin disease* (LSD).

Selain itu, masih ketatnya arus lalu lintas hewan ternak yang dibarengi syarat penyertan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) diyakininya mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli hewan potong di RPH.

"Di sini kami jamin soal perawatan hewannya, kami beri vitamin dan pengawasan dari tenaga dokter hewan," ujarnya dilansir Antara.

Perusahaan berstatus badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun telah membuka lokasi penjualan hewan kurban mulai 29 Mei 2024.

Fajar menyatakan, selama sepekan dibuka animo masyarakat sudah tinggi, itu dibuktikan dengan jumlah sapi yang terjual.

"Dari 50 yang sudah ada di sini terjual 40 ekor. Sapi kami bertahap datangnya," ucap dia.

Perusahaan yang bergerak di bidang pemotongan hewan ini juga menggandeng masyarakat dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari panitia Idul Adha 2024.

"Untuk kemas kirim ada 10 tim, masing-masing berisi 10 orang dan tim pemotongan 10 regu, setiap satu tim ada 8 orang. Total 180-an dari MBR," ucapnya.

Selain itu, untuk menjamin proses penyembelihan sesuai dengan syariat, pihaknya menerjunkan empat juru sembelih halal yang telah mengantongi sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Kok sedikit? Tugasnya cuma menyembelih," kata dia.

Aturan Kemenag
Sementara itu, Kementerian



Hilman Latief

Agama (Kemenag) menerbitkan surat edaran mengenai panduan pelaksanaan Dam jamaah haji Indonesia 1445 Hijriah/2024 Masehi, yang salah satu isinya perihal standarisasi atau kriteria rumah potong hewan (RPH).

"Edaran ini antara lain mengatur kriteria hewan Dam dan standar RPH. Hewan Dam yang dibeli dalam keadaan sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Makkah, Sabtu (8/6/2024).

Hilman menjelaskan, edaran tersebut terbit sebagai panduan bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Petugas Haji Daerah (PHD), dan jamaah calon haji Indonesia dalam pelaksanaan Dam agar sesuai dengan ketentuan syariat dan memiliki kemanfaatan yang luas.

Ada sejumlah kriteria hewan Dam. Pertama, jenis hewan ternak, yaitu kambing, domba, dan unta. Kedua, cukup umur, yaitu kambing dan domba minimal umur satu tahun, dan unta minimal umur lima tahun.

Kriteria ketiga, kondisi hewan sehat. Misalnya, kambing dan domba tidak menunjukkan gejala klinis Peste de Petits Ruminants (PPR) perakut dan akut. Unta juga tidak menunjukkan gejala klinis parah atau berat.

"Hewan Dam juga tidak menunjukkan gejala klinis penyakit mulut dan kuku (PMK) berat," kata dia dikutip dari Antara.

Berkemana RPH, ada sejumlah standar yang perlu diperhatikan saat jamaah akan menentukan pilihannya.

Pertama, RPH harus memiliki izin resmi atau sertifikat dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kedua, RPH berlokasi di dalam Tanah Haram (Makkah). Ketiga, pengelolaan hewan Dam dalam RPH tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

"Untuk optimalisasi pemanfaatan daging hewan dam, diutamakan RPH yang bersedia menyalurkan daging hewan Dam kepada pihak-pihak yang berhak menerima, terutama ke negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Hilman.

"Khusus pelaksanaan dam PPIH atau petugas haji, dikoordinir oleh Kepala Daerah Kerja Makkah, Madinah, dan Bandara," tambahnya.

Terbitnya edaran ini, kata Hilman, sekaligus mencabut Surat

Edaran Dirjen PHU Nomor 04 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dam/Hadyu Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Terpisah, anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mengingatkan pemerintah agar memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan pada momen menjelang Hari Raya Idul Adha 2024 terjamin kesehatannya atau terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).

"Kita juga harus bisa memastikan kepada pemerintah untuk pastikan agar ini bisa dijaga karena fungsi pemerintah salah satunya itu menjaga kesehatan hewan," kata Saadiah dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube DPR RI di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

la lalu menilai pemerintah juga perlu memastikan daerah-daerah di tanah air steril dari penyakit PMK atau telah dijamin oleh Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, langkah tersebut juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan adanya perlindungan terhadap konsumen.

Berikutnya, Saadiah mengingatkan pula pemerintah dapat memastikan ketersediaan hewan kurban cukup untuk umat Islam di tanah air yang merayakan Hari Raya Idul Adha.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mengatakan bahwa ketersediaan pasokan hewan kurban di seluruh Indonesia untuk Idul Adha 2024 dalam kondisi yang surplus 88 ribu ekor sehingga dipastikan aman dan mencukupi.

"Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor, dengan ketersediaannya yang mencapai 2,06 juta ekor, maka ketersediaan hewan kurban tahun ini berpotensi surplus hingga 88 ribu ekor," kata dia dilansir Antara.

Berdasarkan data tersebut, Mentan Amran memastikan jumlah ketersediaan hewan kurban baik sapi, kerbau, kambing maupun domba untuk memenuhi kebutuhan nasional sangat mencukupi bahkan surplus.

Mentan juga menyebutkan bahwa saat ini pihaknya aktif memonitor ketersediaan hewan kurban di seluruh daerah. Tidak hanya dari sisi ketersediaan, dirinya mengaku juga fokus memastikan dari aspek kesehatan.

Hal senada disampaikan pula oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Nasrullah. Ia bahkan menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kurban tahun ini.

"Kami memastikan sertifikat kesehatan ternak yang dilalulntaskan sudah lengkap, memeriksa ear tag untuk menjamin ternak telah teregister dan kami menerjunkan petugas kesehatan hewan di kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan rutin di penampungan ternak," ujar dia.

Title	MENTAN MEMBANGUN PANGAN DI INDONESIA TIMUR	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Majalah Tempo	
Page	3	
Author	Majalah Tempo	

KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTAN MEMBANGUN PANGAN DI INDONESIA TIMUR

Dengan mengusung konsep transformasi pertanian modern, Merauke berpotensi menjadi lumbung pangan nasional.

Pangan selalu diposisikan sebagai sektor yang sangat strategis. Sudah tentu, pangan menjadi urusan wajib yang harus ditangani dengan baik, bahkan merupakan mati dan hidupnya suatu bangsa”.

Kalimat itu diucapkan Presiden Bung Karno pada 1952, saat peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pangan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan rakyat.

Pangan tidak hanya memberikan banyak lapangan pekerjaan, pangan yang dikonsumsi merupakan penyambung nyawa kehidupan. Karena itu, menciptakan kondisi pangan yang cukup dan selalu tersedia sepanjang waktu merupakan tanggung jawab pemerintah.

Tingginya ketergantungan bangsa ini pada sektor pangan dari hulu hingga hilir, melahirkan adagium pangan untuk kesejahteraan, pangan untuk kemakmuran, dan pangan untuk keberkahan hidup. Dalam pidato monumentalnya, Bung Karno menyebutkan, “politik pangan yang akan dipilih, mestilah yang berpihak kepada rakyat banyak, bukan hanya sekelompok orang”.

Salah satu bukti perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor pangan adalah membangun pertanian di Merauke, Papua Selatan. Pada saat menjadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2024, di lahan sawah Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengatakan ini merupakan bukti keseriusan negara dalam menjadikan



Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, bertindak sebagai inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 di Lahan Sawah Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Merauke sebagai lumbung pangan Indonesia. “Ini adalah momentum terbaik untuk membangun pertanian di Merauke,” ucapnya.

Dia menegaskan pembangunan pertanian di Merauke harus dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan dan keadilan. “Dengan mengusung konsep transformasi pertanian modern, Merauke berpotensi menjadi lumbung pangan nasional,” ujarnya. Amran telah menyerahkan sejumlah bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian di

Merauke, termasuk alat mesin pertanian dan benih unggul. Menurut dia, bantuan tersebut sepenuhnya untuk mendukung produksi padi petani Merauke, dengan target perluasan lahan pertanian dari 40 ribu hektare menjadi satu juta hektare.

“Jika tercapai, bisa menghasilkan 15 juta ton gabah atau sekitar delapan juta ton padi. Ini bisa menjadi cadangan pangan. Ini bukti keseriusan kami, dalam satu bulan ini saya sudah tiga kali ke Merauke,” ujar Amran.

Merauke, kata dia, memiliki potensi lahan pertanian seluas 1,2 juta hektare. Hingga 2023 telah dimanfaatkan untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura seluas 67,6 ribu hektare dengan luas baku sawah (LBS, 2023) 42,3 ribu hektare.

Amran mengatakan potensi optimasi lahan rawa di Merauke mencapai 44,7 ribu hektare. Lokasinya tersebar di tujuh titik utama yakni Distrik Jagebob seluas 5.060 hektare, Distrik Kurik seluas 12,7 ribu hektare, Distrik Malind seluas 6.186 hektare, Distrik Merauke seluas 1.686 hektare, Distrik Naukenjerai 261 hektare, Distrik Semangga seluas 7.027 hektare, dan Distrik Tanah Miring seluas 11,7 ribu hektare.

Dalam kunjungannya ke Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Merauke, pada 1 Juni 2024, Amran menegaskan pentingnya optimalisasi lahan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan mencapai produksi padi yang maksimal. “Hari ini kami tinjau, optimalisasi lahan, areal di sini biasanya tanam satu kali, kami jadikan tiga kali. Jadi pendapatan petani meningkat tiga kali lipat, ini akan berdampak signifikan pada produksi pangan nasional,” ujarnya.

Menurut dia, pertanian merupakan sektor vital bagi suatu bangsa dan mengapresiasi semua pihak yang telah mendedikasikan energi mereka untuk bersama-sama membangun pertanian di Merauke. Kembali pada semangat Bung Karno dan Hari Lahir Pancasila, tidak ada satu pun negara di dunia yang bubar karena kelebihan bahan pangan. “Tapi sejarah mencatat, ada negara yang hancur berantakan dikarenakan kekurangan bahan pangan,” ucap Amran.●

INFO TEMPO

Title	Pemkab Muaraenim Gelar Pelatihan Juleha	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Palembang Pos	
Page	5	
Author	OZI	

Pemkab Muara Enim Gelar Pelatihan Juleha

MUARAENIM - Untuk menjamin kesehatan, keamanan, dan kelayakan daging kurban pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 H mendatang, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, menggelar Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) di Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim, Sabtu, 8 Juni 2024.

"Ini waktu yang sangat tepat karena sebentar lagi mendekati hari raya idul Adha sebab akan banyak masyarakat yang akan menyembelih hewan kurban. Sebab tidak setiap orang melakukan pemotongan atau penyembelihan. Itu bisa karena belum paham, takut dan sebagainya. Makanya kita gelar pelatihan ini," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan (TPHP) Kabupaten Muara Enim Ir H Ulil Amri MM yang mewakili Bupati Muara Enim.

Menurut Ulil bahwa setiap Hari raya Idul Adha kita umat Islam selalu melaksanakan ibadah kurban dengan cara menyem-

belih hewan (kurban).

Namun dalam pemotongan Hewan Kurban tidak sembarangan tetapi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor - 114/Permentan/PD.410/9/2014 serta Fatwa MUI Nomor : 12 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa penyembelihan yang syari harus memenuhi beberapa kriteria yaitu Hewan yang disembelih harus Halal, cukup umur, sehat dan tidak cacat, serta masih hidup saat disembelih.

Penyembelih harus beragama Islam, telah aqil baligh, dan memahami penyembelihan yang syari. Kemudian, Alat sembelih Harus tajam, bukan kuku / gigi / taring atau tulang.

Terakhir, harus memahami tata cara penyembelihan secara syari, yaitu Hewan dirobuhkan pada bagian kiri dengan posisi kepala menghadap kiblat dengan teknik tertentu tanpa melukai fisik kurban lalu membaca Tasmiyah ketika akan disembelih.

Dengan adanya pela-

tihan Juru Sembelih Halal, lanjut Ulil diharapkan dapat memberikan dampak positif pada proses penyembelihan hingga pengemasan dan pendistribusian daging dengan baik dan memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

"Intinya dalam proses penyembelihan hewan kurban harus memenuhi dua aspek sekaligus, yakni aspek kehalalan dan aspek Kesejahteraan Hewan (Kesrawan). Hal itu merupakan persyaratan prinsip dasar penyembelihan," katanya.

Masih dikatakan Ulil, bahwa pihaknya berharap agar melalui pelatihan ini para peserta dapat berinovasi dalam pengaplikasiannya di tempat usahanya masing-masing dan menularkan ilmu yang didapat kepada orang lain sehingga nantinya akan semakin banyak masyarakat yang memahami tatacara menyembelih hewan baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pada kegiatan Idul Adha.

Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dapat memenuhi persyaratan teknis terutama menjamin daging kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat sesuai kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Di Indonesia, sambung Ulil, panduan tentang penyembelihan yang halal mengacu pada tiga regulasi utama. Pertama, Halal Assurance System (HAS) 23103 dan Guideline of Halal Assurance System Criteria on Slaughterhouses.

Kedua, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No.196 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal. Ketiga adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 99002:2016 tentang Pemotongan Halal.(OZI)

Title	Andi Sudi dan Andi Iwan Perebutkan Rekomendasi Gerindra	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Tribun Timur	
Page	8	
Author	Erlan Saputra/sim	

Andi Sudi dan Andi Iwan Perebutkan Rekomendasi Gerindra

● Temui Ketua Gerindra Toraja Utara

TORAJA, TRIBUN - Bakal Calon Gubernur Sulsel, Andi Sudirman aktif keliling kabupaten/kota untuk memperkuat dukungannya di berbagai daerah.

Salah satu langkah signifikan Andi Sudirman adalah pertemuannya dengan Ketua Gerindra Toraja Utara (Torut), Fredrik Victor Palimbong.

Bahkan pertemuan itu diunggah di akun Instagram pribadi, Andi Sudirman Sulaiman.

Pertemuan dengan Wakil Bupati Toraja Toraja tersebut diunggah di akun Instagram pribadi Andi Sudirman Sulaiman.

Dalam unggahannya, Andi Sudirman menjelaskan bahwa

kunjungan tersebut untuk meninjau salah satu proyek infrastruktur jalan yang telah dikerjakannya sewaktu masih menjabat sebagai gubernur.

"Jalan Balele (Toraja Utara) yang dibangun melalui bantuan Keuangan Provinsi TA 2022 telah ramai digunakan oleh masyarakat, termasuk untuk aktivitas jogging dan jalan anti-mager," kata Andi Sudirman, Sabtu (8/6/2024).

"Ada empat ruas jalan yang dibangun dengan total nilai 20 miliar dan telah membantu perbaikan akses jalan, sehingga memperlancar mobilitas barang dan jasa masyarakat Toraja Utara," tambah Andi Sudirman.

Pertemuan ini menarik perhatian publik dan pengamat politik karena menunjukkan dinamika politik yang semakin menarik di Sulsel.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto menilai upaya Andi Sudirman bertemu dengan ketua Gerindra daerah adalah sebagai bagian pergerakan politik.

"Karena bisa saja

posisi Pak Andi Iwan Darmawan Aras justru bisa digoyang dari pengurus-pengurus Gerindra di Kabupaten/Kota," kata Ali Armunanto kepada Tribun-Timur, Minggu (9/6/2024).

Tak hanya itu, bisa jadi Amran Sulaiman berupaya melakukan pergerakan di pusat.

"Jadi apa yang kita lihat saat ini tampaknya ada ketegangan antara Andi Amran Sulaiman-Andi Sudirman dan Andi Iwan Darmawan Aras terkait siapa yang akan diusung oleh DPP Gerindra," katanya.

Ali Armunanto berpendapat, ketegangan antara klan Amran Sulaiman dan Andi Iwan ini tentu akan membawa dampak buruk.

"Baik klan Amran Sulaiman maupun untuk kader Gerindra di Sulsel, konflik ini kan akan memunculkan persepsi publik yang negatif terhadap tokoh-tokoh Sulsel dan orang Gerindra di Sulsel," terangnya.

"Sementara ini sebenarnya mereka butuh konsolidasi dan solidaritas untuk menghadapi Pilkada serentak," tambahannya.(erlan saputra/sim)



PERTEMUAN CAGUB - Mantan wali kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin menemui langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras beberapa waktu lalu. Mereka adalah bakal calon gubernur Sulsel pada Pilkada 2024 mendatang.



"Jadi apa yang kita lihat saat ini tampaknya ada ketegangan antara Andi Amran Sulaiman-Andi Sudirman dan Andi Iwan Darmawan Aras terkait siapa yang akan diusung oleh DPP Gerindra."

ALI ARMUNANTO
Pengamat Politik Unhas

Andi Sudirman Sulaiman

Lahir: Bone, 25 September 1983

Jabatan:

Wakil Gubernur Sulsel 2018-2022

Gubernur Sulsel (2022-2023)

Andi Iwan Darmawan Aras

Lahir: Ujung Pandang, 26 Juni 1976 (47 Th)

Jabatan: Ketua DPD Gerindra Sulsel

Pengalaman

Anggota DPR-RI, 2014-sekarang

Wakil Ketua Komisi V DPR RI

Perolehan kursi DPRD Sulsel Pileg 2024

 **NasDem**
17 kursi

 **Gerindra**
13 kursi

 **PKB**
8 kursi

 **Demokrat**
7 kursi

 **PAN**
4 kursi

Total
85 kursi

 **Golkar**
14 kursi

 **PPP**
8 kursi

 **PKS**
7 kursi

 **PDIP**
6 kursi

 **Hanura**
1 kursi

Syarat
mengusung
17 kursi

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan sampai Desember 2024	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Batam Pos	
Page	16 Part 1	
Author	JP Group & Gustia Benny	

Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan sampai Desember 2024

Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY

JAKARTA (BP) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

"Bantuan pangan (beras 10 kg) ini diputus dalam rapat internal sama Pak Presiden, dilanjutkan bulan delapan, 10 dan 12. Anggarannya sekitar Rp9 triliun," kata Arief di sela menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Arief menjelaskan bahwa keputusan kelanjutan bantuan



F. DALIL HARAHAP/BATAM POS

PETUGAS sedang menyusun beras bulog yang akan dibagikan kepada warga.

pangan beras 10 kilogram untuk tahap tiga sudah ditetapkan Presiden Jokowi yang akan berlanjut pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

"Tahun lalu kan juga *nggak full* 12 bulan, tahun ini (dilanjutkan tahap tiga untuk bulan

8, 10, dan 12 karena Pak Presiden kan selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan akan melihat postur APBN juga," ucap Arief.

Dia menuturkan bantuan pangan beras tersebut juga tidak penuh sebanyak 12 bu-

lan, lantaran menyesuaikan dengan APBN.

"Kalau APBN-nya, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) menyampaikan kita akan lakukan tiga bulan, maka tiga bu-

■ Baca **BANSOS...** Hal 14

Title	Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan sampai Desember 2024	
Date	10 Juni 2024	
Media	Batam Pos	
Page	16 Part 1	
Author	JP Group & Gustia Benny	

Bansos Beras 10 Kg Lanjutkan ...

Sambungan dari hal 16

lan berarti bulan 8, 10, dan 12. Karena kita lihat juga fiskal, jangan hanya untuk pemenuhan bantuan pangan, tapi kegiatan yang lain yang penting juga jangan sampai tertinggal, itu

keputusannya dalam rapat kabinet,” jelas Arief, dikutip dari *Antara*, Minggu (9/6).

Sebelumnya, Arief mengatakan bantuan itu membuktikan bahwa kehadiran dan perhatian pemerintah yang terus menyokong perekonomian 22 juta

keluarga penerima manfaat. “Sebanyak 22 juta keluarga itu kalau secara individu bisa sampai sekitar 89 juta atau artinya hampir seper-tiga rakyat Indonesia yang diberikan beras Bulog yang berkualitas baik,” imbuhnya. (*)

Title	Bantuan Irigasi Pompa Diterima Poktan	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Satelit News	
Page	10	
Author	Jpg	

Bantuan Irigasi Pompa Diterima Poktan

SATELITNEWS, LEBAK--Menghadapi musim kemarau berkepanjangan Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan bantuan irigasi pompa kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk memperkuat produksi pangan di Kabupaten Lebak.

"Kami berharap bantuan irigasi pompa dapat meningkatkan produksi pangan," kata Ketua Gapoktan Desa Tambakbaya Kabupaten Lebak Ruhiana saat dikonfirmasi di Rangkasbitung. Penyaluran bantuan irigasi pompa sebanyak dua unit itu, berupa uang total sebesar Rp220 ribu dan satu unitnya Rp110 ribu.

Kelompok tani yang membeli pompa sebanyak dua unit dengan kapasitas 6 inci, termasuk pipa untuk mengaliri areal persawahan seluas 40 hektare. Pompa itu dengan sistem menyedot sumber air permukaan dari Sungai Ciujung dan disalurkan ke sarana irigasi areal persawahan.

"Sekarang irigasi pompa itu sudah dioperasikan dan semua petani di sini telah melakukan gerakan tanam padi," kata Ruhiana. Menurut dia, areal persawahan di lokasi Gapoktan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak seluas 150 hektare, tetapi pompa yang dibantu Kementan bisa



ILUSTRASI: Pompa air yang berfungsi mengaliri sawah.

mengaliri seluas 40 hektare.

Sedangkan, seluas 110 hektare

akan dibantu pompanisasi dari Desa Tambakbaya sebanyak tujuh titik seluas 35 hektare, dan sisanya dari pemerintah daerah. "Kami berharap dengan adanya bantuan irigasi pompa dan pompanisasi bisa meningkatkan percepatan tanam, meski terjadi kemarau berkepanjangan," katanya menjelaskan.

Ujang (55), seorang petani di Desa Tambakbaya Kabupaten Lebak mengatakan dirinya merasa senang bisa melakukan percepatan tanam padi melalui irigasi pompa sehingga terpenuhi ketersediaan pasokan air. "Kami sudah tanam padi seluas satu hektare dan panen awal

September 2024," katanya menjelaskan.

Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar mengatakan Kementan menyalurkan irigasi pompa sebanyak 115 unit kepada gapoktan di daerah itu, dan satu unit harus mengaliri persawahan seluas 20 hektare. Namun, bantuan irigasi pompa dikerjakan secara swakelola pekerjaan oleh kelompok tani. "Kami meyakini bantuan pompa itu dipastikan dapat meningkatkan indeks percepatan (IP) dari satu kali tanam bisa menjadi tiga kali tanam dalam setahun," katanya menjelaskan. (jpg)

Title	Dorong Petani Belajar Bikin Pupuk Organik	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Tribun Medan	
Page	10	
Author	Cr13	

Dorong Petani Belajar Bikin Pupuk Organik

► **Pemkab Samosir Serahkan Bantuan Alsintan ke Sejumlah Poktan**

PANGURURAN, TRIBUN – Guna meningkatkan hasil pertanian di Samosir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir memberikan bantuan pupuk organik cair dan alat mesin pertanian (Alsintan) ke sejumlah kelompok tani (Poktan).

Bupati Samosir Vandiko Gultom menjelaskan, dana untuk bantuan tersebut bersumber dari APBD dan APBD Kabupaten Samosir.

"Bantuan yang diserahkan secara simbolis tersebut bersumber dari APBD dan APBD Kabupaten Samosir, diantaranya 10 unit traktor roda 2, pompa air 5,5 hp/3inc sebanyak 44 unit, pompa air 8,5 hp/4inc sebanyak 3 unit, pupuk organik cair sebanyak 10.832 liter kepada 245 Poktan, penbenahan EM4 7.100 liter untuk 242 Poktan dan molase sebanyak 6.700 liter kepada 202 Poktan," ujar Vandiko Gultom, Minggu (9/6).

"Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen membantu petani dengan memberikan pupuk organik cair

dan alat-alat pertanian. Inovasi dengan menjalin sinergitas Pemerintah Daerah dengan Provinsi mau pun Pusat terus diupayakan guna mendapatkan bantuan kepada petani," sambungnya.

Di samping meningkatnya kuota pupuk kimia bersubsidi di Kabupaten Samosir, ia juga mendorong petani mau belajar dalam pembuatan pupuk organik. Sebagaimana komitmen membantu sertifikasi pupuk organik buatan petani, ia menyebutkan, Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan hasil uji laboratorium dan pupuk organik dari Kabupaten Samosir sudah lolos uji.

"Pemberian pupuk gratis ini hanya stimulan, pupuk organik dari Samosir sudah lolos uji, kita tinggal membangun rumah produksinya. Selain digunakan untuk kebutuhan petani juga akan dapat dijual guna memberikan nilai tambah bagi petani," sambungnya.

Menurutnya, guna mendukung ketahanan pangan, ia juga mengerahkan seluruh

kepala desa untuk membantu petani dengan pembelian alat pencacah kompos melalui anggaran dana desa. "Kami sudah sangat mendukung pertanian termasuk melalui anggaran desa. Bentuk dukungan lain, 2023 anggaran kuota pupuk bersubsidi naik sekitar 15 persen dan naik 10 persen tahun 2024. Komitmen ini agar semua petani mendapatkan pupuk dan tidak semua daerah mendapatkannya," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak selalu mengeluh kekurangan pupuk karena pada tahun 2023 ditemukan banyak pupuk yang tidak ditebus kelompok tani.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Vandiko menegaskan tahun 2024 akan diadakan realokasi atau pengalihan kuota dari kelompok tani yang tidak mengambil pupuk ke kelompok lain yang membutuhkan.

"Semoga bantuan ini bermanfaat untuk peningkatan perekonomian masyarakat, jangan diperjual-belikan tetapi dibagi secara adil. Mohon betul-betul diserahkan kepada anggota kelompok," sambungnya.

Selanjutnya, Plt. Kadis Ketapang dan Pertanian Tumitur Gultom mengatakan, pemberian bantuan traktor roda dua dan pompa air untuk mendukung petani yang sebelumnya tidak menanam padi namun rela beralih.

Selain meningkatkan indeks tanam padi sawah dan padi gogo, hal ini juga sebagai upaya antisipasi menghadapi darurat pangan yang diprediksi terjadi di Indonesia.

Tumitur mengatakan, Pemkab Samosir Samosir mendapat 500 hektare kuota untuk penanaman padi gogo dari Kementerian dan baru 170 ha CPCL yang tersedia, maka diharapkan petani memperluas lahan memanfaatkan bantuan tersebut. (cr3)



DARI APBN - Guna meningkatkan hasil pertanian di Samosir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir memberikan bantuan pupuk organik cair dan alat mesin pertanian (Alsintan) ke sejumlah kelompok tani (Poktan). Dana untuk bantuan tersebut bersumber dari APBD dan APBD Kabupaten Samosir.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Garam Naik Stok Beras Diklaim Aman	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Satelit News	
Page	8	
Author	Rus/bnn/gatot	

Garam Naik, Stok Beras Diklaim Aman

SATELITNEWS, SERANG--Harga komoditas sejumlah bahan pangan di wilayah Provinsi Banten pada Minggu (9/6) terpantau naik dibanding hari sebelumnya. Dan untuk kebutuhan beras menjelang Hari Raya Idul Adha 2024 stoknya dinyatakan aman.

Berdasarkan data harga pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu (9/6) pukul 09.17 WIB, dari 20 komoditas terdapat 7 komoditas naik dan 13 komoditas turun. Komoditas yang naik harga yaitu garam halus beryodium, minyak goreng curah, beras premium, cabai rawit merah, dan jagung tingkat peternak. Namun, harga beberapa komoditas seperti ikan bandeng, tepung terigu (curah), gula konsumsi, beras medium, dan minyak goreng kemasan sederhana menurun dibanding kemarin.

Komoditas jagung tingkat peternak naik paling tinggi Rp510 atau 6,81 persen menjadi Rp8 ribu per kg. Adapun harga ikan bandeng turun paling rendah Rp2.560 atau 8,49 persen menjadi Rp27.590 per kg. Kepala Badan Pangan Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, bahwa stok beras cadangan pemerintah dalam kondisi yang aman, menghadapi Hari Raya Idul Adha 2024.

"Sekarang kan semuanya sudah dipersiapkan (menghadapi Idul Adha). Jadi, kita punya (beras) cadangan pangan, cadangan pemerintah," katanya di sela menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Arief menyampaikan bahwa



ILUSTRASI Beras.

ISTIMEWA

stok cadangan beras pemerintah saat ini yang dikuasi Perum Bulog mencapai 1,8 juta ton. Stok tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat utamanya menghadapi Idul Adha.

Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah bersama Presiden Joko Widodo untuk memantau sejumlah harga pangan, bahkan meninjau sejumlah gudang beras Perum Bulog.

"Kemarin saya baru dari Agam di Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat juga sudah punya cadangan pangan," ucap Arief.

Selain Sumatera Barat, Arief mengatakan juga telah mengunjungi berbagai daerah lainnya seperti Kota Lubuklinggau di Sumatera Selatan; Kota Dumai, Pakanbaru di Riau; Merangin di Jambi; Kota Kendari, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Sudah banyak yang kami kunjungi, udah keliling. Bahkan

sebelumnya ke Biak, ke Nagekeo di NTT, Kupang, banyak," ujar Arief.

Meski begitu Arief tidak merinci sejumlah harga pangan. Namun, dia memastikan bahwa pangan di daerah yang telah dikunjungi bersama Presiden Joko Widodo dalam kondisi yang relatif aman dan terjangkau.

"Harga-harga relatif stabil. Dengan Pak Presiden kemarin kan baru dari Riau. Ya tugas kita memang harus memastikan harga stabil dan stok aman, karena wilayah kita itu luas," tutur Arief.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan bahwa stok beras dalam menghadapi Idul Adha 2024 dalam kondisi yang aman, karena saat ini stok di gudang BUMN bidang pangan itu mencapai 1,81 juta ton.

"(Jelang Idul Adha) saat ini stok (beras) Bulog sangat aman, karena kami memiliki stok 1,81 juta ton. Menurut saya stok itu sangat aman (menghadapi Idul Adha, Red)," kata Bayu. **(rus/bnn/gatot)**

Title	Indonesia Optimistis Jadi Lumbung Pangan Dunia	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	7	
Author	ASJ	

Indonesia Optimistis Jadi Lumbung Pangan Dunia

JALAN keluar yang relatif lebih cepat untuk meningkatkan pertanian saat ini adalah optimasi pompanisasi di lahan-lahan pertanian. Bila program ini dijalankan, Indonesia optimistis dapat mewujudkan swasembada bahkan juga bisa menjadi lumbung pangan dunia.

Hal itu dikatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Pemandangan Nota Kesepahaman bersama Menteri

Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Untuk itu, Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui optimasi pompanisasi demi mewujudkan swasembada pangan Indonesia.

"Ingat saat ini ada banyak negara yang mengalami penurunan produksi (pangan) dan ada banyak penduduk dunia yang menderita kelaparan. Oleh

karena itu, harus kita mitigasi dengan solusi cepat berupa optimasi melalui pompanisasi," kata Amran.

Ia memaparkan, kebijakan jangka pendek Kementan menuju swasembada, di antaranya optimasi lahan sawah 400 ribu hektar, pompanisasi sawah 1 juta hektar, dan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern seluas 250 ribu hektar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Amran sebagai upaya mencapai swasembada pangan. Tito menilai Amran memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mencapai kemandirian pangan.

"Yang saya tahu, pada zaman Pak Jokowi, swasembada itu bermula di tangan beliau (Andi Amran Sulaiman). Sekarang, semangat beliau menggelora kembali," ujar Tito.

Pelibatan militer

Tito optimistis, semangat Kementan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia akan tercapai sebab angkatan kerja Indonesia saat ini menjadi yang

terbesar di dunia. Ditambah sumber daya alam Indonesia yang melimpah, maka upaya perluasan areal tanam (PAT) sudah tepat.

Ia juga menyatakan dukungan pelibatan militer dalam memperkuat program pertanian. Ini karena, menurut Tito, militer dan pertanian adalah satu kesatuan yang bisa memperkuat pertahanan.

"Saya mendukung TNI terlibat langsung pada program pertanian karena dalam pertahanan juga ada pertanian. Oleh karena itu, kita perlu kebersamaan, baik pemerintah daerah maupun pusat. Untuk menuju negara dominan, kita harus membanting produksi," imbuh Tito.

Adapun sinergi tugas dan fungsi dalam nota kesepahaman yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun ke depan, antara Kementan dan Kemendagri, meliputi empat ruang lingkup. Pertama, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Identitas Kependudukan Digital.

Kedua, tugas dan pemanfaatan data atau informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan



FOTO: HENDRIK KURNIAWAN/ANTARA

perundang-undangan. Ketiga, mendorong pemerintah daerah dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

Keempat, peningkatan kapasitas

sumber daya manusia di bidang pertanian dan di bidang kerja sama lain yang disepakati kedua belah pihak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [ASJ]



Title	Percepatan Migrasi eSTDB RSPO dan Setara Jambi Gelar Focus Group Discussion FGD Para Pihak	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Tribun Jambi	
Page	3	
Author	Tribun Jambi	

Percepatan Migrasi e-STDB, RSPO dan Setara Jambi Gelar Focus Group Discussion (FGD) Para Pihak

Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) menjadi acuan bagi petani swadaya sawit untuk raih sertifikasi komoditas sawit. Pemerintah Republik Indonesia menargetkan percepatan migrasi STDB ke STDB elektronik (red: e-STDB) sebanyak tiga juta hingga kurun waktu dua tahun ke depan.

Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) bekerjasama dengan Yayasan Setara Jambi dan didukung Dinas Perkebunan Provinsi Jambi telah mengupayakan peningkatan kapasitas petani swadaya sawit langsung di tingkat tapak. Satu diantaranya adalah percepatan migrasi STDB menuju e-STDB.

RSPO yang merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan berbagai elemen penting dalam industri sawit dari hulu hingga hilir seperti petani swadaya sawit, Non Government Organization (NGO), perusahaan, pemerintah, serta investor.

Untuk menjalankan prinsipnya di Provinsi Jambi, RSPO bekerjasama dengan yayasan Setara Jambi dalam menerapkan sawit berkelanjutan bagi petani swadaya. Upaya yang bukan instan, dimulai dari sosialisasi, pelatihan pengelolaan sawit secara berkelanjutan, pelatihan untuk pelatih serta sertifikasi di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun.

RSPO mempunyai kerjasama (MOU) dengan pemerintah provinsi dengan tiga pemerintah kabupaten yaitu kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Barat dan kabupaten Sarolangun.

Dengan MOU ini berpusat pada bagaimana membantu petani dapat tersertifikasi ISPO.

Dalam persyaratan ISPO, itu salah satunya dalam mencapai e-STDB," Ucap Guntur Cahyo Prabowo (Head of Smallholders Program Global RSPO).

" RSPO merasa bahwa e-STDB itu menjadi basis utama sebelum kemudian proses sertifikasi karena dia berbicara tentang pemetaan dari lahan tersebut, profil dari pekebunnya sendiri jadi itu



Dari kanan: 1. Guntur Cahyo Prabowo(head of smallholders program global RSPO) 2. Zamrony (perwakilan Dinas Perkebunan Sarolangun 3. Agusrizal (Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jambi) 4. Lucky Lukmana Sukriya (Ketua Kelompok Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Ditjenbun Kementerian Pertanian RI) 5. Subhan (Kabid PSDA Bappeda Prov. Jambi) 6. Kholilul Ikhwani (Kabid Prasarana, sarana dan penyuluhan - Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tebo)

sebenarnya line bersamaan dengan proses sertifikasi saling mendukung," Tambahnya.

Tentulah kenapa kita hari ini mengadakan acara ini karena benar benar punya audiensi karena ini juga mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai dua setengah juta penduduk agar teregristrasi dengan e-STDB," Tuturnya.

Kami sepakat karena itu penting. Jadi RSPO sangat mendukung proses e-STDB sebagai basis utama dengan memastikan keberadaan mereka profilnya seperti apa jadi kita tau apa yang akan kita bantu," Pungkas Guntur.

Menindaklanjuti percepatan migrasi menuju e-STDB, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktur PPHP Ditjenbun, Prayudi Syamsuri menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh RSPO bekerjasama dengan Yayasan Setara Jambi di Ruang Aurduri, Hotel Luminor Kota Jambi pada Kamis (6/6).

"Saat ini percepatan migrasi STDB elektronik tidak harus didahului dengan sosialisasi. Selagi tujuannya untuk percepatan keberlanjutan dan persemakmuran rakyat,

kita bisa pangkas birokrasi," kata Prayudi.

Hal tersebut turut didukung oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Agusrizal, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang turut menjadi pemateri pada FGD tersebut menyampaikan dukungan langsung kepada lembaga yang membantu percepatan e-STDB petani swadaya sawit di Jambi.

"Kita akan gesa pekerjaan ini. Kita bantu semua stakeholder yang terlibat untuk migrasi menuju STDB elektronik. Penting sekali merapikan dokumen yang berkaitan dengan usaha perkebunan agar pemangku kebijakan dapat mengatur regulasi yang tepat guna," tutur Agusrizal.

FGD yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Tanjung Jabung Barat, serta perwakilan petani swadaya tersebut menghasilkan rencana tindak lanjut percepatan migrasi di tiga kabupaten, yaitu Sarolangun, Tebo, dan Tanjung Jabung Barat. Ketiga kabupaten tersebut akan menggesa migrasi paling lambat pada bulan Juli 2024.

"Kami petani swadaya pada dasarnya ingin mematuhi peraturan dan regulasi yang ada. Namun, kadang ada kendala seperti



GUNTUR CAHYO PRABOWO
(Head of Smallholders Program Global RSPO).

komunikasi dengan dinas terkait, namun kini dapat dikomunikasikan dengan baik dengan difasilitasi Yayasan Setara Jambi," papar Sulistyono, petani swadaya dari Sarolangun. (*)



Penyerahan simbolis STDB oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Ir Agus Rizal MM kepada Dirjenbun PPHP Lucky Lukmana Sukriya untuk dukungan e-STDB.



Foto bersama pada acara Focus Group Discussion yang digelar Yayasan setara dan RSPO di Luminor Hotel 6 Juni 2024.

Title	Pemkab Dukung Polbangtan Kementan Kembangkan Petani Milenial Malang	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Poskota	
Page	9	
Author	Ham	

Pemkab Dukung Polbangtan Kementan Kembangkan Petani Milenial Malang

JAKARTA (Poskota) - Kementerian Pertanian RI bersama International Fund For Agriculture (IFAD) melalui Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) pada sejumlah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Malang.

Kementan bersama IFAD berupaya mewujudkannya via Program YESS dan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) selaku Provincial Project Implementation Unit [PPIU] pada sejumlah provinsi di antaranya adalah Polbangtan Malang selaku PPIU Program YESS Jawa Timur.

Dukungan dan partisipasi aktif pemerintah daerah, turut menentukan keberhasilan Program YESS, seperti diupayakan Polbangtan Malang demi meningkatkan sinergitas dengan Pemkab Malang melalui kegiatan District Multi Stakeholders Forum [DMSF] di Malang pada Rabu [6/6] di ruang rapat Anusapati, Jl Merdeka Timur No 3 Malang.

Kegiatan DMSF juga bertujuan menyamakan persepsi tentang teknis tata kelola dan aturan yang perlu dipenuhi bagi pelaksana maupun pihak terkait [stakeholders] secara terstruktur dan sistematis guna memaksimalkan kegiatan fasilitasi petani milenial di wilayah binaan.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, mendorong petani muda Indonesia memanfaatkan pendidikan vokasi sebagai pusat pembelajaran bagi petani milenial dan wirausahawan muda pertanian terdidik. "Saya meyakini bahwa Polbangtan akan memberi dukungan penting dalam pengembangan usaha pertanian yang modern dan mandiri," katanya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi mengatakan, era modernisasi merupakan ladang emas bagi profesi petani. "Memilih bertani menjadi sumber mata pencaharian merupakan prospek yang menjanjikan

dan berperan penting," katanya.

Direktur Polbangtan Malang, Setya Budhi Udayana menegaskan bahwa PPIU Jawa Timur dan seluruh jajarannya terus berupaya mengembangkan kelembagaan petani milenial sebagai amanah dari BPPSDMP Kementan. "Kami berharap mendapatkan arahan konstruktif dari semua pihak agar pengembangan petani muda di Jawa Timur dan sekitarnya," katanya.

Ketahanan Pangan

Upaya tersebut, kata Udayana, diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif, sehingga Kementan dapat menjawab tantangan ketahanan pangan dengan baik melalui generasi milenial.

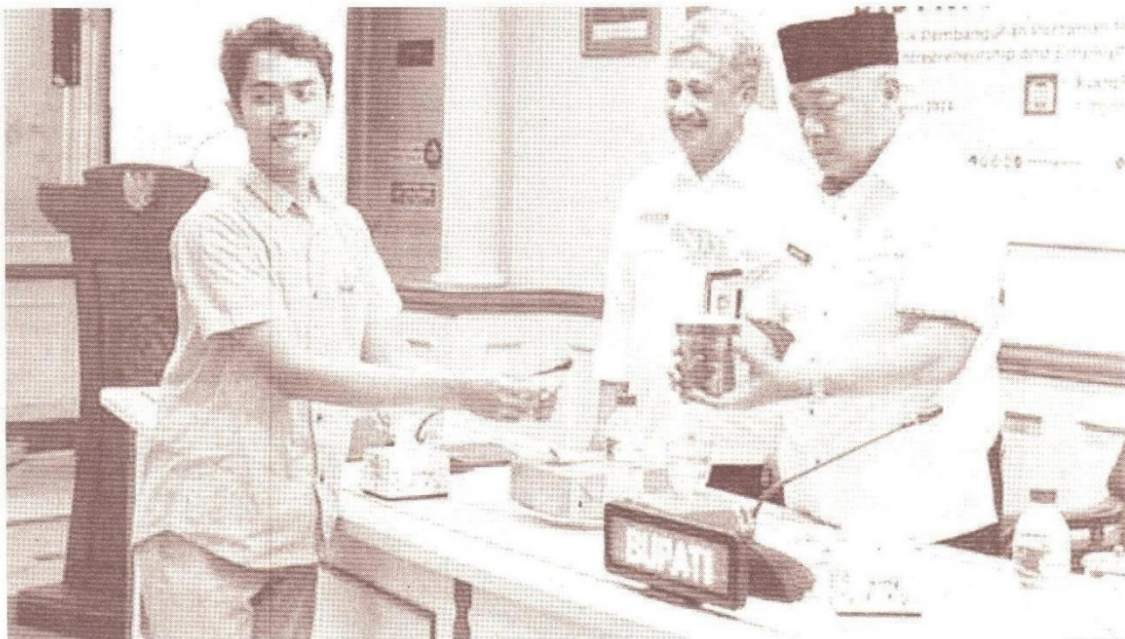
Pertemuan DMSF dihadiri oleh para pemangku kepentingan seperti Bupati Malang HM Sanusi; Kepala Bappeda Pemkab Malang, Tomie Herawanto; Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Avicenna M Saniputra; Direktur Pol-

bangtan Malang, Setya Budhi Udayana selaku PPIU Jatim; Organisasi Perangkat Desa [OPD] se-Kabupaten Malang dan Balai Penyuluhan Pertanian selaku BDSP dan para petani milenial binaan Program YESS.

Bupati Malang HM Sanusi meminta Bappeda untuk mengkaji dan merumuskan keberlanjutan Program YESS tersebut, didukung regulasi dan kebijakan pendampingan berkesinambungan bagi petani milenial.

"Tentu kita sepakat bahwa Program YESS dirancang untuk menghasilkan wirausahawan tani muda pedesaan yang tangguh dan berkualitas, serta menghasilkan ketenagakerjaan kompeten di bidang pertanian," katanya.

Malang, salah satu kabupaten di Jatim menjadi lokasi pelaksanaan Program YESS. Saat ini memfasilitasi 13.000 pemuda pertanian melalui sejumlah pelatihan seperti Motivasi Bisnis, Manajemen Bisnis, Literasi Keuangan dan Rencana Usaha. (*/ham)



Poskota/ist

Bupati Malang HM Sanusi (kanan) menyerahkan secara simbolis bibit tanaman pada petani milenial Malang didampingi Direktur Polbangtan Malang, Setya Budhi Udayana (tengah).

Tittle	Anggarann Rp9 Triliun Disiapkan Untuk Bansos Beras 10 Kg Lanjutan	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Bari/ant	

Anggaran Rp9 Triliun Disiapkan Untuk Bansos Beras 10 kg Lanjutan

NERACA

Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

"Bantuan pangan (beras 10 kg) ini diputus dalam rapat internal sama Pak Presiden, (dilanjutkan) bulan delapan, 10 dan 12. (Anggarannya) sekitar Rp9 triliun," kata Arief di sela menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Arief menjelaskan bahwa keputusan kelanjutan bantuan pangan beras 10 kilogram untuk tahap tiga sudah ditetapkan Presiden Jokowi yang akan berlanjut pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

"Tahun lalu kan juga nggak full 12 bulan, tahun ini (dilanjutkan tahap tiga untuk bulan) 8, 10, dan 12 karena Pak Presiden kan selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan akan melihat postur APBN juga," ucap Arief.

Dia menuturkan bahwa bantuan pangan beras tersebut juga tidak penuh sebanyak 12 bulan, lantaran menyesuaikan dengan APBN. "Kalau APBN-nya, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) menyampaikan kita akan lakukan tiga bulan, maka tiga bulan berarti bulan 8, 10, dan 12. ● bari/ant

Title	Jokowi Disebut Sebagai Bapak Pengendali Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Bari/ant	

Jokowi Disebut Sebagai Bapak Pengendali Pangan

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) merupakan orang yang tepat dikatakan sebagai "Bapak Pengendali Inflasi". "Kalau Puang (sebutan gelar bangsawan masyarakat Bugis) menyampaikan saya Bapak Inflasi, sebetulnya Bapak Inflasi adalah Bapak Jokowi, Karena saya dapat perintah dari beliau itu bulan September 2022, ketika angkanya 6 persen," kata Tito di sela Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Menteri Pertanian di Jakarta, Jumat (7/6).

■ NERACA

Tito menyampaikan hal itu, menanggapi pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menyebut bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai "Bapak Pengendali Inflasi".

Menurut Tito, orang yang tepat untuk disematkan sebagai Bapak Inflasi

Indonesia adalah Presiden Joko Widodo. Ia mengaku hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Negara sehingga bisa menekan inflasi dari 6 persen per September 2022, kini menjadi 2,84 persen per Mei 2024.

"Dan kita memang pemerintah pusat menargetkan kendali inflasi pada angka 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya maksimal

3,5 persen dan paling rendah 1,5 persen," ujar Tito. Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak akan bisa mencapai inflasi 0 persen, karena Indonesia sebagai negara produksi, bukan seperti Singapura yang merupakan negara konsumsi yang tidak memiliki sawah dan petani.

Dia menjelaskan bagaimana inflasi Indonesia bisa ditekan hingga 2,84 persen. Awalnya pada September 2022, ketika inflasi 6 persen, Tito mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi.

Ketika dipanggil Kepala Negara, Tito menjelaskan bahwa langkah yang harus dilakukan adalah daerah harus dikendalikan dan tidak boleh diam saja. Karena ilmunya menangani inflasi itu, lanjut Tito, menurut Harvard cuma satu instrumen dan berlaku di seluruh dunia, yaitu pengendalian bunga bank.

"Ketika kemudian terjadi inflasi tinggi maka suku bunga dinaikkan, begitu suku bunga dinaikkan maka produksi akan turun, demand (permintaan) juga

akan turun, otomatis inflasi akan turun. Tapi ketika inflasi terlalu rendah, maka bunga juga akan direndahkan supaya demand akan naik. Ilmunya itu," papar Tito.

Namun, Tito mengaku bahwa penjelasan itu tidak disetujui oleh Presiden saat itu. Bahkan Kepala Negara langsung menginstruksikan kepada Mendagri agar menangani inflasi seperti mengatasi wabah pandemi COVID-19. "Pak Jokowi bilang enggak, kita pake ilmu yang lain, ilmu COVID-19. Semua seluruh dunia tidak ada yang ahli COVID, karena COVID yang terakhir sekali pandemi adalah pada saat tahun 1927 artinya 100 tahun lebih," ungkap Tito.

Presiden lalu memerintahkan Mendagri memerintahkan wilayah mulai rumah sakit mana yang penuh, daerah dengan kasus meninggal terbanyak, hingga kasus positifnya tertinggi dikategorikan merah. Sementara, untuk wilayah di luar kategori itu diberi tanda kuning, dan hijau. ●bari/ant

Tittle	SIDAK PASAR TRADISIONAL	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	1	
Author	Neraca	



NERACA/Antarafoto/Makna Zaezar/nz

SIDAK PASAR TRADISIONAL : Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) berdialog dengan pedagang sembako saat melakukan inspeksi di Pasar tradisional Karang Ayu, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/6/2024). Inspeksi menteri perdagangan di pasar tradisional tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan sembako dan harga-harga kebutuhan pokok seperti ayam potong, beras, telur, cabai, bawang merah dan putih menjelang hari raya Idul Adha 1445 Hijriah.

Tittle	Garam Naik Stok Beras Diklaim Aman	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Banten Post	
Page	10	
Author	RUS/AZM	

SERANG, BANPOS - Harga komoditas sejumlah bahan pangan di wilayah Provinsi Banten pada Minggu (kemarin) terpantau naik dibanding hari sebelumnya. Dan untuk kebutuhan beras menjelang Hari Raya Idul Adha 2024 atau Lebaran Haji ini stok nya dinyatakan aman.

Berdasarkan data harga pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu (9/6) pukul 09.17 WIB, dari 20 komoditas terdapat 7 komoditas naik dan 13 komoditas turun.

Komoditas yang naik harga yaitu garam halus beryodium, minyak goreng curah, beras premium, cabai rawit merah, dan jagung tingkat peternak.

Namun, harga beberapa komoditas seperti ikan bandeng, tepung terigu (curah), gula konsumsi, beras medium, dan minyak goreng kemasan sederhana menurun dibanding, kemarin.

Komoditas jagung tingkat peternak naik paling tinggi Rp510 atau 6,81 persen menjadi Rp8 ribu per kg. Adapun harga ikan bandeng turun paling rendah Rp2.560 atau 8,49 persen menjadi Rp27.590 per kg.

Berikut daftar lengkap harga 20 bahan pangan di Banten menurut Bapanas per tanggal 9 Juni 2024 pukul 09.17 WIB, daging sapi Murni: Rp134.940 per kg (turun 2,27%), Cabai Merah Keriting: Rp48.470 per kg (turun 1,56%), Bawang Putih Bonggol: Rp41.290 per kg (naik 3,61%), Cabai Rawit Merah:

Rp39.790 per kg (naik 6,08%).

Bawang Merah: Rp38.260 per kg (turun 8,01%), Daging Ayam Ras: Rp36.970 per kg (naik 0,35%), Ikan Kembung: Rp33.250 per kg (turun 1,69%), Ikan Tongkol: Rp30.000 per kg (turun 4,91%), Telur Ayam Ras: Rp27.660 per kg (turun 2,43%), Ikan Bandeng: Rp27.590 per kg (turun 8,49%), Gula Konsumsi: Rp18.170 per kg (turun 1,41%), Minyak Goreng Kemasan Sederhana: Rp16.660 per liter (turun 0,48%)

Beras Premium: Rp15.330 per kg (naik 3,72%).

Minyak Goreng Curah: Rp14.660 per liter (naik 1,24%), Kedelai Biji Kering (Impor): Rp12.410 per kg (turun 2,67%), Tepung Terigu Kemasan (non-curah): Rp12.330 per kg (turun 0,8%), Beras Medium: Rp12.140 per kg (turun 0,57%), Garam Halus Beryodium: Rp11.290 per kg (naik 6,61%), Tepung Terigu (Curah): Rp9.970 per kg (turun 1,38%), jagung Tingkat Peternak: Rp8.000 per kg (naik 6,81%).

Kepala Badan Pangan Bapanas Arief Prasetyo Adi seperti dikutip Antara News mengatakan,

bahwa stok beras cadangan pemerintah dalam kondisi yang aman, menghadapi Hari Raya Idul Adha 2024.

"Sekarang kan semuanya sudah dipertapakan (menghadapi Idul Adha). Jadi, kita punya (beras) cadangan pangan, cadangan pemerintah," katanya di sela menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Arief menyampaikan bahwa

stok cadangan beras pemerintah saat ini yang dikuasai Perum Bulog mencapai 1,8 juta ton. Stok tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat utamanya menghadapi Idul Adha.

Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah bersama Presiden Joko Widodo untuk memantau sejumlah harga pangan, bahkan meninjau sejumlah gudang beras Perum Bulog.

"Kemarin saya baru dari Agam di Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat juga sudah punya

cadangan pangan," ucap Arief.

Selain Sumatera Barat, Arief mengatakan juga telah mengunjungi berbagai daerah lainnya seperti Kota Lubuklinggau di Sumatera Selatan; Kota Dumai, Pekanbaru di Riau; Merangin di Jambi; Kota Kendari, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Sudah banyak yang kami kunjungi, udah keliling. Bahkan sebelumnya ke Biak, ke Nagekeo di NTT, Kupang, banyak," ujar Arief.

Meski begitu Arief tidak merinci sejumlah harga pangan. Namun, dia memastikan bahwa pangan di daerah yang telah dikunjungi bersama Presiden Joko Widodo dalam kondisi yang relatif aman dan terjangkau.

"Harga-harga relatif stabil. Dengan Pak Presiden kemarin baru dari Riau. Ya tugas kita memang harus memastikan harga stabil dan stok aman, karena wilayah kita itu luas," tutur Arief.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan bahwa stok beras dalam menghadapi Idul Adha 2024 dalam kondisi yang aman, karena saat ini stok di gudang BUMN bidang pangan itu mencapai 1,8 juta ton.

"(Jelang Idul Adha) saat ini stok (beras) Bulog sangat aman, karena kami memiliki stok 1,8 juta ton. Menurut saya stok itu sangat aman (menghadapi Idul Adha, Red)," kata Bayu. (RUS/AZM)

Title	Jelang Lengser Jokowi Dijuluki Bapak Pengendali Inflasi	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Gorontalo Post	
Page	7	
Author	Disway	

Jelang Lengser, Jokowi Dijuluki Bapak Pengendali Inflasi

JAKARTA- Jelang 134 hari terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutnya sebagai “Bapak Pengendali Inflasi”. Hal itu disampaikan Tito usai menanggapi pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menyebut bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai “Bapak Pengendali Inflasi” pada Jumat 7 Juni 2024 malam.

Menurut Tito, orang yang tepat untuk disematkan sebagai Bapak Inflasi Indonesia adalah Presiden Joko Widodo.

Ia mengaku hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Negara sehingga bisa menekan inflasi dari 6 persen per September 2022, kini menjadi 2,84 persen per Mei 2024.

“Kalau Puang (sebutan gelar bangsawan masyarakat Bugis) menyampaikan saya Bapak Inflasi, sebetulnya Bapak Inflasi adalah Bapak Jokowi, Karena saya dapat perintah dari beliau itu bulan September 2022, ketika angkanya 6 persen,” kata Tito di Jakarta.

“Dan kita memang pemerintah pusat menargetkan kendali inflasi pada angka 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya maksimal 3,5 persen dan paling rendah 1,5 persen,” tambahnya.

Ia mengatakan bahwa

Indonesia tidak akan bisa mencapai inflasi 0 persen, karena Indonesia sebagai negara produksi, bukan seperti Singapura yang merupakan negara konsumsi yang tidak memiliki sawah dan petani.

Tito juga menjelaskan bagaimana inflasi Indonesia bisa ditekan hingga 2,84 persen. Awalnya pada September 2022, ketika inflasi 6 persen, Tito mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi.

Ketika dipanggil Kepala Negara, Tito menjelaskan bahwa langkah yang harus dilakukan adalah daerah harus dikendalikan dan tidak boleh diam saja.

Karena ilmunya menangani inflasi itu, lanjut Tito, menurut Harvard cuma satu instrumen dan berlaku di seluruh dunia, yaitu pengendalian bunga bank.

“Ketika kemudian terjadi inflasi tinggi maka suku bunga dinaikkan, begitu suku bunga dinaikkan maka produksi akan turun, demand (permintaan) juga akan turun, otomatis inflasi akan turun. Tapi ketika inflasi terlalu rendah, maka bunga juga akan direndahkan supaya demand akan naik. Ilmunya itu,” papar Tito.

Namun, Tito mengaku bahwa penjelasan itu tidak disetujui oleh Presiden saat itu. Bahkan Kepala Negara langsung menginstruksikan kepada

Mendagri agar menangani inflasi seperti mengatasi wabah pandemi COVID-19. “Pak Jokowi bilang enggak, kita pake ilmu yang lain, ilmu COVID-19. Semua seluruh dunia tidak ada yang ahli COVID, karena COVID yang terakhir sekali pandemi adalah pada saat tahun 1927 artinya 100 tahun lebih,” ungkap Tito.

Presiden lalu memerintahkan Mendagri memetakan per wilayah mulai rumah sakit mana yang penuh, daerah dengan kasus meninggal terbanyak, hingga kasus positifnya tertinggi dikategorikan merah.

Sementara, untuk wilayah di luar kategori itu diberi tanda kuning, dan hijau. Bagi yang kuning bisa bergerak, namun masih ada sejumlah pembatasan sedangkan hijau bisa bergerak bebas.

Kebijakan itu diambil sebagai langkah menyeimbangkan antara penanganan COVID-19 dengan pengendalian ekonomi. Karena ada negara yang kencang dan berhasil menangani COVID-19 tetapi ekonominya kolaps.

Ilmu itu kemudian yang diminta oleh Jokowi untuk diterapkan terhadap penanganan inflasi. Dan Presiden juga meminta semua pemangku kepentingan berkumpul setiap daerah dicek dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).
(disway)

Tittle	Kementan Banntu Irigasi Pompa Perkuat Produksi Pangan di Lebak	
Date	10 Juni 2024	
Media	Banten Post	
Page	12	
Author	Ant	

Kementan Banntu Irigasi Pompa Perkuat Produksi Pangan di Lebak

RANGKASBITUNG, BANPOS - Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan bantuan irigasi pompa kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk memperkuat produksi pangan di Kabupaten Lebak, Banten, dalam menghadapi musim kemarau berkepanjangan.

"Kami berharap bantuan irigasi pompa dapat meningkatkan produksi pangan," kata Ketua Gapoktan Desa Tambakbaya Kabupaten Lebak Ruhiana saat dikonfirmasi di Rangkasbitung, Jumat.

Penyaluran bantuan irigasi pompa sebanyak dua unit itu, berupa uang total sebesar Rp220 ribu dan satu unitnya Rp110 ribu.

Kelompok tani yang membeli pompa sebanyak dua unit dengan kapasitas 6 inci, termasuk pipa untuk mengalir areal persawahan seluas 40 hektare.

Pompa itu dengan sistem menyedot sumber air permukaan dari Sungai Ciujung dan disalurkan ke sarana irigasi areal persawahan.

"Sekarang irigasi pompa itu sudah dioperasikan dan semua petani di sini telah melakukan gerakan tanam padi," kata Ruhiana.

Menurut dia, areal persawahan di lokasi Gapoktan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak seluas 150 hektare, tetapi pompa yang dibantu Kementan bisa

mengaliri seluas 40 hektare.

Sedangkan, seluas 110 hektare akan dibantu pompanisasi dari Desa Tambakbaya sebanyak tujuh titik seluas 35 hektare, dan sisanya dari pemerintah daerah.

"Kami berharap dengan adanya bantuan irigasi pompa dan pompanisasi bisa meningkatkan percepatan tanam, meski terjadi kemarau berkepanjangan," katanya menjelaskan.

Ujang (55), seorang petani di Desa Tambakbaya Kabupaten Lebak mengatakan dirinya merasa senang bisa melakukan percepatan tanam padi melalui irigasi pompa sehingga terpenuhi ketersediaan pasokan air.

"Kami sudah tanam padi seluas satu hektare dan panen awal September 2024," katanya menjelaskan.

Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar mengatakan Kementan menyalurkan irigasi pompa sebanyak 115 unit kepada gapoktan di daerah itu, dan satu unit harus mengalir persawahan seluas 20 hektare.

Namun, bantuan irigasi pompa dikerjakan secara swakelola pekerjaan oleh kelompok tani.

"Kami meyakini bantuan pompa itu dipastikan dapat meningkatkan indeks percepatan (IP) dari satu kali tanam bisa menjadi tiga kali tanam dalam setahun," katanya menjelaskan. (ANT)



Title	PEMDA DIMINTA MANFAATKAN LAHAN TIDUR	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Banten Post	
Page	1 Part 1	
Author	ENK/ANT	

PEMDA DIMINTA MANFAATKAN LAHAN TIDUR

JAKARTA, BANPOS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta setiap kepala daerah di seluruh Indonesia agar memanfaatkan lahan tidur menjadi pertanian yang produktif, guna menciptakan ketersediaan pangan dan menuju swasembada pangan.

“Kami juga minta kepada seluruh daerah supaya lahan-lahan tidur yang nggak produktif, bisa dijadikan

BACA **PEMDA** HAL - 9

Title	PEMDA DIMINTA MANFAATKAN LAHAN TIDUR	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Banten Post	
Page	1 Part 2	
Author	ENK/ANT	

Pemda Diminta...

Sambungan dari Halaman 1

lahan pertanian. Artinya menambah lahannya (untuk pertanian)," kata Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Menteri Pertanian di Jakarta, akhir pekan lalu.

Mendagri menekankan pentingnya pemanfaatan lahan tidur menjadi pertanian produktif karena sangat berkaitan dengan ketahanan dan swasembada pangan. Menurutnya, pemanfaatan lahan tidur secara efektif dapat meningkatkan produksi pangan secara lokal, dengan demikian mengu-

rangi ketergantungan pada impor pangan, dan meningkatkan kemandirian pangan negara.

Selain meminta untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan pertanian yang produktif, Tito juga mengingatkan kepada setiap pemerintah daerah agar tidak mengubah lahan pertanian menjadi tempat bisnis. "Selain tadi, kami juga akan mendorong pertanian, mempertahankan lahan yang sudah ada, jangan di-convert menjadi daerah komersial ataupun atau yang lain-lain," ucap Tito.

Selanjutnya Tito juga mengingatkan kepada pemerintah daerah yang jika sudah memiliki lahan

pertanian agar lebih dioptimalkan sehingga bisa membantu dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah hingga nasional.

Dia mengaku bahwa ke depannya pihaknya akan membuat surat edaran yang akan ditujukan kepada seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia.

Selanjutnya Kemendagri akan membuat tim khusus untuk melakukan evaluasi terhadap surat edaran tersebut yang akan dibuat, guna mengetahui daerah mana saja yang sudah melaksanakan ataupun tidak melaksanakan dari surat edaran nantinya.

"Nah itu diantaranya poin-poin

yang kita akan sampaikan surat edaran kepada kepala daerah. Dan setelah itu nanti kita akan buat tim, tim untuk mengevaluasi yang mana yang mengerjakan, mana yang tidak," tutur Tito.

Tito menekankan bahwa pemerintah pusat akan memberikan reward bagi kepala daerah yang berhasil mengerjakan tugas ini dengan baik. Namun, sebaliknya, Tito juga menyatakan bahwa akan ada punishment bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas ini dengan baik. "Yang mengerjakan kita akan berikan *reward*, yang tidak mengerjakan ya ada *punishment*-nya," imbuh Tito. (ENK/ANT)

Title	Pemprov Sumbar Optimalkan Upaya Pemulihan Pasca Bencana	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Rakyat Sumbar	
Page	1 Part 1	
Author	AD.ADPSB	

Pemprov Sumbar Optimalkan Upaya Pemulihan Pasca Bencana

Dukungan Percepatan
Penanganan Rehap Rekon
Terus Dimaksimalkan

STATUS tanggap darurat bencana banjir bandang, banjir lahar dingin, dan longsor telah berakhir 9 Juni 2024. Upaya penanganan terus dioptimalkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibawah kepemimpinan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, termasuk dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam percepatan pemulihan dan penanganan dampak pasca bencana tersebut, Gubernur Mahyeldi juga terus melakukan upaya "jemput bola" langsung ke pusat. Diantaranya dengan mendatangi



GUBERNUR Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan dihadiri Mendagri dan Kepala Badan Pangan Nasional, di Gedung F Kementan RI, Jumat lalu.

kantor Kementerian Pertanian RI (Kementan) di Jakarta, Jumat (7/6) lalu. Kedatangan Gubernur beserta rombongan bertujuan un-

tuk melaporkan perkembangan proses pendataan lahan masyarakat yang terdampak bencana yang masih berlangsung dan mendo-

rong percepatan pencairan bantuan dari Kementerian Pertanian.

» Baca *Pemprov...* di hal 2

Tittle	Pemprov Sumbar Optimalkan Upaya Pemulihan Pasca Bencana
Date	10 Juni 2024
Media	Rakyat Sumbar
Page	1 Part 2
Author	AD.ADPSB



Kementerian Pertanian

Pemprov Sumbar...

Sambungan dari hal 1

Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat berkunjung ke salah satu lokasi terdampak bencana di Sumbar pada (18/5) lalu. Dimana Menteri menjanjikan akan membantu biaya perbaikan lahan dan bibit tanaman yang terdampak bencana sebesar Rp 10 Miliar.

Mahyeldi mengaku saat ini proses pendataan terus diikuti. Bahkan, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar telah bekerjasama dengan Badan Standarisasi Instrumen Holtikultura Kementerian untuk melakukan pemetaan lahan masyarakat yang terdampak.

"Hasil sementara dari pemetaan tersebut, ada 6 kategori tingkat kerusakan mulai dari sangat berat sampai ringan. Untuk memperoleh data spasial dan detail dari lahan yang akan diperbaiki, kita juga akan melakukan pemotretan per area terdampak menggunakan drone," sebut Gubernur Mahyeldi dalam lawatan tersebut yang diterima langsung oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman beserta jajarannya.

Menyikapi hal tersebut Setjen Kementan, Prihasto Setyanto menyebut anggaran bantuan itu sedang dalam proses revisi DIPA di Direktorat Jendral Anggaran. Sementara menunggu pengesahan anggaran, pihaknya mendorong agar Pemprov Sumbar menyerakan penuntasan proses pendataan di lapangan.

"Jadi sama-sama kita bergerak, kami upayakan bantuan dan Pemprov percepat pendataan," ajaknya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah juga mengikuti rapat koordinasi (Rakor) di Kantor Kementan, Jumat (7/6). Rakor Perluasan Areal Tanaman (PAT) dan Penadatangan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Menteri Dalam Negeri tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Rakor ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Komjen Tito Karnavian; Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi. Selain itu,

juga hadir secara daring Gubernur, Bupati, Walikota dan sejumlah Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI-Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian secara simbolis menyerahkan Nota Kesepahaman terkait Program/Kegiatan Cetak Sawah Rakyat secara Swakelola kepada empat provinsi di Indonesia yang diterima langsung oleh Gubernurnya masing-masing, diantaranya Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan khusus Provinsi Sumbar, selain menerima nota kesepahaman dari Mendagri. Juga mendapat bantuan lain dari Kementan berupa 250 unit Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan program penanaman jagung seluas 10.000 Hektar.

"Bantuan tersebut belum bisa dicairkan sekarang sebab anggaran bantuan itu berada dalam Anggaran Belanja Tambahan APBN Kementerian Pertanian Tahun 2024. Kendati demikian, kita bersyukur karena telah mendapat kepastian diawal," ungkap Mahyeldi.

Selain lahan pertanian terdampak, bencana tersebut juga menyebabkan masyarakat kehilangan hewan ternaknya. Bahkan berdasarkan data sementara pada 6 Juni lalu jumlahnya mencapai 27.320 ekor. Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli menyampaikan untuk sektor peternakan yang terdampak juga sudah diajukan ke Kementan RI.

"Sampai saat ini untuk penggantian ternak terdampak bencana belum ada alokasi anggarannya, karena fokus kementan pada perbaikan lahan pertanian untuk mendukung ketersediaan pangan khususnya tanaman pangan. Untuk Pemerintah provinsi, bagi peternak yang terganggu dalam kelompok ternak, menjadi prioritas untuk difasilitasi tahun depan sesuai usulan pemerintah kabupaten/kota," jelasnya.

Penanganan Sektor Kesehatan Dimaksimalkan
Pada bidang kesehatan, berbagai upaya juga sudah dilakukan Pemprov Sumbar

melalui dinas kesehatan provinsi pasca bencana yang terjadi, diantaranya dengan melakukan kajian cepat krisis kesehatan (rapid health assessment) bersama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Sesuai dengan arahan Gubernur kita juga menuruti tim EMT (emergency medical team) bersama tim EMT kabupaten/kota, mendirikan pos pelayanan kesehatan di daerah yang terdampak bersama Dinkes kabupaten/kota dengan melibatkan rumah sakit, organisasi profesi, PMI, NGO," sebut Kadinkes Sumbar Lila Yanwar dalam keterangannya, kemarin.

Ia menyampaikan, kesehatan adalah sektor yang paling terdampak di setiap bencana, dan perlu penanganan yang tepat dan efektif. Untuk itu didirikan Health Emergency Operational Center (HEOC) di kabupaten/kota terdampak dengan pendampingan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.

"Pemantauan kesehatan dan pelayanan gizi pada kelompok rentan (ibu, bayi, anak balita, lansia) dan serta pelayanan kesehatan reproduksi juga dilakukan, begitu juga dengan surveilans penyakit berpotensi KLB," terangnya.

Ia menambahkan, pemantauan ketersediaan sarana bersih, melakukan uji bakteriologis sampel air minum, pemantauan kesling terutama di dapur umum dan tempat pengungsian, penyemprotan desinfektan berkoordinasi dengan Balai Karantina Kesehatan.

"Pasca bencana yang terjadi kita juga memberi bantuan berupa obat-obatan, PMT Balita dan Ibu hamil dan Kantong Mayat. Mobilisasi Pelayanan Kesehatan bersama dinkes kabupaten/kota, Rumah Sakit, organisasi profesi, PMI dan NGO lainnya. Memberikan edukasi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di pengungsian. Melakukan pelayanan trauma healing/pendampingan psikososial bersama dengan RSJ HB Saanin, Persi, Organisasi profesi, NGO," jelasnya.

Perbaikan Dampak Kerusakan Butuh Rp 1,6 T
Status tanggap darurat

bencana yang ditetapkan Pemprov Sumbar berakhir 9 Juni 2024. Bencana banjir bandang, lahar dingin dan longsor di Sumbar yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan sebanyak 63 orang meninggal dunia, 10 orang dinyatakan hilang, mengungsi 4.064 orang, rumah rusak 1.110 unit, rumah terdampak 1.210 unit, sarana kesehatan 2 unit, tempat ibadah 28 unit dan bangunan lainnya 2 unit.

Bencana yang terjadi berdampak terhadap kerusakan sarana perdagangan 227 unit, irigasi 1.202 unit, PDAM/Pamsimas 23 unit, jembatan 55 unit, jalan lebih kurang 54 titik, ternak 27.320 ekor, pertanian sekitar 908.003 hektar.

"Yang terparah itu berada di daerah Tanahdatar, Agam, Limapuluh Kota, dan Padangpanjang. Daerah tersebut terkena dampak dari erupsinya Gunung Merapi, berupa banjir bandang, banjir lahar dingin hingga tanah longsor," sebut Sekdaprov Sumbar Hansastri saat memberikan keterangan pers, di Kantor Dinas Kominfo Sumbar, Jumat (7/6).

Kondisi terakhir korban terdampak bencana di pengungsian sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka tidak ada lagi di tenda-tenda pengungsian, tetapi mengungsi ke tempat keluaraga. "Dengan kondisi ini maka dapur umum yang telah didirikan sudah diakhiri. Namun, masih ada beberapa dapur umum yang masih berdiri di tingkat nagari," jelasnya.

Ia menyampaikan, operasi yang dilakukan selama bencana berupa, pencarian korban yang hilang, pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak, pemetaan pengungsi, pemetaan pemukiman korban bencana. Juga dilakukan pemecahan batu di hulu sungai, perbaikan infrastruktur, sinkronisasi data korban meninggal dan hilang dengan Basarnas dan Tim DVI Polri dan membentuk posko pendamping di Istana Bung Hatta Bukittinggi.

Upaya penanganan bencana yang dilakukan, meliputi normalisasi sungai dan pembersihan material, perbaikan akses jalan ke Lembah

Anai yang terputus, pembangunan jembatan Bailey, demolis atau pemecahan batu ukuran besar di hulu sungai. Juga dilakukan modifikasi cuaca yang musim hujan di Gunung Marapi yang berpotensi hujan.

"Selain itu juga dilakukan truma healing, merencanakan relokasi rumah di rawan bencana. Termasuk juga kegiatan memasang plang larangan membangun di Lembah Anai. Dalam penanganan bencana juga melibatkan masukan dari Forum Rektor dari 27 perguruan tinggi di Sumbar, banyak masukan strategis. Termasuk juga melibatkan mahasiswa KKN."

Untuk tindak lanjut penanganan bencana ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, terangkan Hansastri juga sudah menemui Komisi V DPR RI, untuk mengusulkan sejumlah dukungan bantuan yang diperlukan untuk penanganan bencana jangka panjang. Termasuk juga ada kunjungan Komisi IV DPR RI yang berkunjung ke Sumbar.

Hansastri juga mengungkapkan, sesuai usulan yang diajukan Gubernur Sumbar kepada Komisi V DPR RI dan Presiden RI Jokowi langsung, untuk penanganan bencana jangka panjang, direncanakan dibangun 56 sabo dan sampai tahun 2027.

"Tahun ini ada 8 sabo yang dibangun. Juga akan dibangun alat early warning system (EWS) yang akan memberi peringatan jika ada tanda-tanda gado atau banjir lahar dingin datang dari Gunung Marapi," terangnya.

Untuk relokasi rumah di rawan bencana, rumah yang hanyut tidak dibangun lagi di lokasi yang sama. Tapi disediakan tempat baru. Relokasi untuk korban bencana banjir bandang dan banjir lahar dingin di Kabupaten Agam masih dalam kajian tim dimana lokasi lahan relokasi bagi korban bencana ditetapkan.

"Sementara itu, untuk Kabupaten Tanahdatar atas permintaan dari pemerintah kabupaten sudah ada lahan yang cocok untuk dilakukan relokasi. Ada tanah aset Pemprov Sumbar yang layak disediakan, yakni di Rambatan

seluas 3,6 hektar untuk membangun 150 rumah bagi warga terdampak banjir bandang dan banjir lahar dingin di Kabupaten Tanahdatar. Lahan ini status tanahnya masih punya Dinas Pertanian Sumbar. Pemprov Sumbar sudah menyiapkan administrasi untuk bisa di pakai relokasi," jelasnya.

Hansastri mengatakan, berdasarkan usulan dari seluruh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah pusat, untuk perbaikan dampak kerusakan yang ditimbulkan bencana juga melibatkan masukan dari Forum Rektor dari 27 perguruan tinggi di Sumbar, banyak masukan strategis. Termasuk juga melibatkan mahasiswa KKN.

Untuk tindak lanjut penanganan bencana ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, terangkan Hansastri juga sudah menemui Komisi V DPR RI, untuk mengusulkan sejumlah dukungan bantuan yang diperlukan untuk penanganan bencana jangka panjang. Termasuk juga ada kunjungan Komisi IV DPR RI yang berkunjung ke Sumbar.

Hansastri juga mengungkapkan, sesuai usulan yang diajukan Gubernur Sumbar kepada Komisi V DPR RI dan Presiden RI Jokowi langsung, untuk penanganan bencana jangka panjang, direncanakan dibangun 56 sabo dan sampai tahun 2027.

"Tahun ini ada 8 sabo yang dibangun. Juga akan dibangun alat early warning system (EWS) yang akan memberi peringatan jika ada tanda-tanda gado atau banjir lahar dingin datang dari Gunung Marapi," terangnya.

Untuk relokasi rumah di rawan bencana, rumah yang hanyut tidak dibangun lagi di lokasi yang sama. Tapi disediakan tempat baru. Relokasi untuk korban bencana banjir bandang dan banjir lahar dingin di Kabupaten Agam masih dalam kajian tim dimana lokasi lahan relokasi bagi korban bencana ditetapkan.

"Sementara itu, untuk Kabupaten Tanahdatar atas permintaan dari pemerintah kabupaten sudah ada lahan yang cocok untuk dilakukan relokasi. Ada tanah aset Pemprov Sumbar yang layak disediakan, yakni di Rambatan

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Petani Diguyur Bantuan Pompa Air irigasi	 Kementerian Pertanian
Date	10 Juni 2024	
Media	Banten Raya	
Page	3	
Author	Tanjung	

Petani Diguyur Bantuan Pompa Air Irigasi

SERANG, BANTEN RAYA - Petani di Kabupaten Serang diguyur bantuan pompa air irigasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Bantuan pompa air irigasi tersebut diharapkan dapat mengatasi kekeringan sawah pada saat terjadi musim kemarau sehingga tidak gagal panen.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang Suhardjo mengatakan, kemarau pada tahun 2024 ini diperkirakan terjadi antara Juli atau Agustus mendatang sehingga para petani diberi bantuan pompanisasi dari Kementan. "Untuk pompa air irigasi kita dapat 131 unit yang kita bagikan ke petani

di 29 kecamatan," ujarnya, Minggu (9/6).

Ia menjelaskan, bantuan pompa air irigasi yang diserahkan pada Mei lalu dalam proses penyerahannya diawasi langsung oleh TNI-Polri. "Harapannya kalau terjadi kemarau kita sudah ada bantuan pompanisasi, memudahkan air irigasinya atau air sungainya mengalir," katanya.

Selain bantuan pompa air irigasi, Kementan juga memberikan bantuan pupuk dan benih padi kepada para petani pada saat musim tanam. "Bulan Juni ini target tanam kita 12 ribu hektare dan sampai saat ini baru mencapai 2 ribu hektare. Bulan Mei ke-

marin target 10 ribu hektare tercapai 11 ribu hektare," ungkapnya.

Suhardjo berharap, dengan dilakukannya percepatana masa tanam ketika terjadi kemarau sudah berbuah sehingga bisa diselamatkan karena jika kemarau tiba baru tanam maka hasilnya tidak maksimal. "Target tanam kita 97.868 hektare, target panen 92.975 hektare, dan target produksi 538.546 ton. Sampai Juni ini untuk tanam terealisasi 64.413 hektare, panen terealisasi 40.607 hektare, dan produksi terealisasi 231.900 ton," katanya.

Pihaknya juga terus berupaya meningkatkan indeks pertanaman (IP) di

Kabupaten Serang seperti di Kecamatan Anyer dimana ada areal tanah yang biasanya belum ditanami karena bendungannya terdampak banjir, pada tahun ini sudah mulai ditanami dari IP 0 menjadi IP 100.

Kemudian di daerah lain seperti di Tenjaya, Kecamatan Tanara yang masih ada aliran airnya yang biasanya sekali tanam dalam setahun kita tingkatan menjadi dua kali dengan adanya bantuan pompa. Terus yang biasanya setahun dua kali kita tingkatan jadi tiga kali, dan yang biasanya tiga kali kita tingkatan menjadi empat kali tanam dalam setahun," tuturnya. (tanjung)



PENYERAHAN BANTUAN: Kepala DKPP Kabupaten Serang Suhardjo (empat dari kiri) menyerahkan bantuan pompa air irigasi kepada petani di halaman kantor DKPP Kabupaten Serang, Kecamatan Ciruas, belum lama ini.